ISLAMOFOBIA STRUKTURAL DI INDIA PADA MASA PEMERINTAHAN PM NARENDRA MODI TAHUN 2019-2024

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

A. Nurul Naimah

21323267

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

ISLAMOFOBIA STRUKTURAL DI INDIA PADA MASA PEMERINTAHAN PM NARENDRA MODI TAHUN 2019-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

A. Nurul Naimah

21323267

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Islamofobia Struktural di India Pada Masa Pemerintahan PM Narendra Modi Tahun 2019-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

20 Februari 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.	
2	Khairul Munzilin, S.IP., M.A.	
3	Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	
4	Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

30 Januari 2026,



A. Nurul Naimah

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GRAFIK viii
DAFTAR SINGKATAN ix
ABSTRAK x
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Cakupan penelitian 5
1.5 Tinjauan Pustaka 6
1.6 Kerangka Pemikiran 8
1.7 Argumen Sementara 10
1.8 Metode Penelitian 11
1.8.1 Jenis Penelitian 11
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 11
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 12
1.8.4 Proses Penelitian 12
1.9 Sistematika Pembahasan 12
BAB 2 ISLAMOFOBIA DI INDIA DAN MASA KEPEMIMPINAN PM NARENDRA MODI 14
2.1. Islamofobia di India 14
2.2. Faktor Hindutva terhadap peningkatan Islamophobia di India 20
BAB 3 ANALISIS ISLAMOFOBIA DI INDIA DALAM PERSPEKTIF ISLAMOFOBIA STRUKTURAL 24
3.1. Kebijakan dan Hukum Diskriminatif 24
3.1.1 Pencabutan Pasal 370 dan Pasal 35A 25
3.1.2 *National Register of Citizens* (NRC) 31
3.1.3 *Citizenship Amendment Act,* 2019 (CAA) 35
3.1.4 *Anti-Conversion law* 38
3.2 Retorika Pemerintah yang Mempolitisasi Muslim sebagai Ancaman 42

3.3 Pengawasan Serta Represi Terhadap Kelompok Muslim 47
BAB 4 PENUTUP 52
4.1. Kesimpulan 52
4.2 Rekomendasi 53
DAFTAR PUSTAKA 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Tahanan Muslim Tahun 2020 45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Wilayah Penyebaran Ujaran Kebencian 41

DAFTAR SINGKATAN

BJP	: Bharatiya Janata Party
RSS	: Rashtriya Swayamsevak Sangh
J&K	: Jammu and Kashmir
CAA	: Citizenship Amendment Act
NRC	: National Register of Citizens
HRW	: Human Rights Watch
IHL	: India Hate Lab
LJ	: Love Jihad
IoA	: Instrument of Accession
AFSPA	: Armed Forces (Special Powers) Act
PSA	: Public Safety Act
SC0	: Supreme Court Observer
AASU	: All Assam Students' Union
AAGSP	: All Assam Gana Sangram Parishad
AIMIM	: All India Majelis-e-Ittehadul Muslimeen
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
UAPA	: Unlawful Activities Prevention Act
OHCHR	: Office of the High Commissioner for Human Rights
FRT	: Facial Recognition Technology
CCTV	: Closed-circuit television

ABSTRAK

Islamofobia merupakan fenomena global yang telah berkembang dari prasangka individu menjadi diskriminasi yang dilembagakan melalui kebijakan dan institusi negara. Di India, Islamofobia memiliki karakteristik khusus karena berkaitan erat dengan nasionalisme mayoritarian berbasis ideologi Hindutva, terutama sejak Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan praktik negara pada masa pemerintahan PM Narendra Modi periode 2019–2024 berkontribusi dalam membentuk dan memperkuat Islamofobia struktural terhadap komunitas Muslim di India. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui analisis literatur, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan dokumen resmi pemerintah. Kerangka analisis yang digunakan adalah konsep Islamofobia struktural dari Khaled A. Beydoun yang menekankan peran negara dalam melegitimasi diskriminasi melalui hukum, kebijakan, retorika politik, serta praktik pengawasan dan represi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti Citizenship Amendment Act (CAA) 2019, National Register of Citizens (NRC), pencabutan Pasal 370 dan 35A di Jammu dan Kashmir, serta Undang-Undang anti-konversi mencerminkan pola diskriminasi sistematis yang menargetkan komunitas Muslim secara tidak adil. Kebijakan tersebut dibingkai dalam narasi keamanan dan integrasi nasional, namun berdampak pada pembatasan hak sipil dan normalisasi marginalisasi Muslim.

Kata-kata kunci: Islamofobia Struktural, Narendra Modi, Hindutva, Kebijakan Diskriminatif, Muslim India.

ABSTRACT

institutionalized discrimination manifested through state policies and institutions. In India, Islamophobia exhibits distinct characteristics due to its close association with majoritarian nationalism rooted in the ideology of Hindutva, particularly since Narendra Modi assumed office as Prime Minister. This study aims to analyze how state policies and practices during Prime Minister Narendra Modi's administration from 2019-2024 have contributed to the formation and reinforcement of structural Islamophobia against the Muslim community in India. This research employs a qualitative approach using a library research method through the analysis of academic literature, scholarly journals, reports from international organizations, and official government documents. The analytical framework is based on Khaled A. Beydoun's concept of structural Islamophobia, which emphasizes the role of the state in legitimizing discrimination through law, policy, political rhetoric, as well as practices of surveillance and repression. The findings indicate that policies such as the Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019, the National Register of Citizens (NRC), the revocation of Articles 370 and 35A in Jammu and Kashmir, and anti-conversion laws reflect patterns of systematic discrimination that disproportionately target the Muslim community. These policies are framed within narratives of national security and integration, yet they result in the restriction of civil rights and the normalization of Muslim marginalization.

Keywords: Structural Islamophobia, Narendra Modi, Hindutva, Discriminatory Policies, Indian Muslims.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, isu Islamofobia semakin menguat di kancah global. Meskipun saat ini Islam merupakan agama dengan pertumbuhan tercepat dibandingkan dengan agama lain (Fahmy 2025). Peningkatan tersebut tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan terhadap kelompok Muslim di beberapa negara. Sebaliknya, Mereka seringkali menjadi sasaran prasangka, stereotip negatif, diskriminasi, hingga kekerasan yang dilegitimasi melalui wacana publik serta kebijakan negara (Dangubić dkk. 2023). Islamofobia kini tidak hanya sebatas kebencian semata antara satu individu atau kelompok terhadap Muslim. Melainkan telah melekat dalam sistem pemerintahan yang mampu mempengaruhi cara negara memperlakukan komunitas Muslim.

Islamofobia dapat dipahami sebagai bentuk rasisme yang menargetkan Muslim melalui ujaran kebencian, representasi negatif, hingga pembentukan kebijakan dan praktik institusional yang merugikan kelompok tersebut (Awan dan Zempi 2020). Hal ini tidak terlepas dari adanya stereotip serta prasangka negatif tentang Islam yang telah ada sejak lama. Adanya narasi yang mengaitkan Islam dengan kekerasan, ekstremisme, dan ancaman keamanan telah lama digunakan untuk membenarkan tindakan eksklusif negara terhadap Muslim. Terkadang ketakutan terhadap Islam sengaja dibentuk dan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara, sehingga melegitimasi lahirnya kebijakan represif dan diskriminatif (Agrawal 2024).

Secara global, istilah Islamofobia mulai dikenal luas setelah *Runnymede Trust* merilis sebuah laporan dengan judul *Islamophobia: A Challenge for us all* pada tahun 1997. Fenomena ini semakin menguat pasca serangan terorisme 11 September 2001 atau 9/11 yang memicu gelombang besar Islamofobia di dunia Barat, dimana mereka mulai menyamakan Islam dengan kelompok ekstremisme. Namun, dalam konteks India, Islamofobia berakar pada nasionalisme mayoritarian berbasis ideologi Hindutva dan kebijakan negara, bukan semata-mata pengaruh narasi keamanan global dari Barat.

Dalam menganalisis peran negara dalam membentuk Islamofobia, Khaled A. Beydoun membagi Islamofobia ke dalam tiga bentuk, yaitu Islamofobia individual, struktural, dan dialektika. Islamofobia struktural merujuk pada bentuk diskriminasi yang dilembagakan melalui hukum, kebijakan, serta institusi negara, yang memposisikan Muslim sebagai kelompok yang dicurigai dan dianggap berbahaya. Dalam kerangka ini, negara tidak hanya menjadi aktor pasif, melainkan berperan aktif dalam membentuk dan menormalisasi Islamofobia melalui instrumen politik (Beydoun 2018).

Meskipun Islamofobia seringkali dikaji dalam konteks negara-negara Barat, fenomena ini juga berkembang secara signifikan di negara non-Barat, termasuk India. Pada tahun 2020, jumlah umat Muslim di India mencapai 15% sekaligus agama dengan pemeluk terbanyak kedua setelah Hindu dengan jumlah populasi sebanyak 79% (Kramer 2021). Banyaknya jumlah umat Muslim di India menjadikannya negara ketiga dengan populasi Muslim terbesar, setelah Indonesia

dan Pakistan (Galan 2025). Meskipun populasi Muslim di India tergolong tinggi, Namun, mereka tetap menjadi minoritas di negara dengan mayoritas Hindu, dimana mereka sering menjadi korban diskriminasi, marginalisasi sosial, serta kekerasan berbasis agama. Posisi Muslim sebagai kelompok minoritas menjadikan mereka rentan terhadap kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan kelompok mayoritas (Maizland 2024).

Secara konstitusional, India merupakan negara sekuler yang menjunjung prinsip netralitas serta toleransi terhadap seluruh agama, sebagaimana yang tercantum dalam beberapa pasal-pasal konstitusi India (Agrawal 2024). Namun, dalam praktiknya, prinsip sekularisme di India kerap diperdebatkan dan bahkan dianggap bersifat semu. Sejak Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014, politik identitas berbasis agama semakin mendominasi sehingga mengakibatkan sekularisme di India semakin terancam (Narain 2024). Modi yang juga merupakan bagian dari *Bharatiya Janata Party* (BJP) dengan aktif mempromosikan ideologi Hindutva dengan mengedepankan identitas serta budaya Hindu sebagai inti dari nasionalisme India (Agrawal 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip konstitusional sekularisme dan praktik politik negara.

Narendra Modi memiliki keterkaitan erat dengan organisasi nasionalis Hindu *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS), yang menjadi fondasi ideologi Hindutva. Ideologi ini memandang India sebagai tanah air eksklusif bagi Hindu, sementara kelompok non-Hindu khususnya Muslim sering dianggap sebagai pihak luar yang berpotensi mengancam identitas nasional (Waikar 2018). Pandangan tersebut kemudian mempengaruhi kebijakan serta praktik pemerintahan, terutama

pada periode kedua pemerintahan Modi.

Islamofobia struktural dalam konteks India dapat dilihat jelas melalui kebijakan negara. Beberapa kebijakan yang diberlakukan di bawah pemerintahan Modi dianggap memperburuk kondisi umat Muslim di India, seperti pemberlakuan *Citizenship Amendment Act* (CAA) tahun 2019 yang mengecualikan Muslim dari daftar perlindungan kewarganegaraan, wacana dan implementasi *National Register of Citizens* (NRC), Pencabutan Pasal 370 dan 35A di Jammu dan Kashmir, serta penerapan Undang-Undang anti-Konversi di beberapa negara bagian, menunjukkan pola kebijakan yang secara tidak langsung maupun langsung menargetkan komunitas Muslim. Kebijakan-kebijakan tersebut sering dibingkai dalam narasi keamanan, integrasi nasional, dan perlindungan identitas mayoritas namun berdampak terhadap pembatasan hak-hak sipil Muslim (Amnesty International 2024b; Vajiram & Ravi 2025b). Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Islamofobia di India tidak hanya hadir dalam bentuk prasangka sosial, melainkan telah terlembaga melalui kebijakan negara dan praktik institusional. Dalam perspektif Islamofobia struktural Khaled A. Beydoun, negara berperan sebagai aktor utama yang membentuk, mengesahkan, dan memproduksi diskriminasi terhadap Muslim melalui hukum, retorika politik, serta mekanisme pengawasan dan represi (Beydoun 2018). Dalam konteks India, pemerintahan Modi menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan politik dan ideologi Hindutva mampu membentuk Islamofobia yang terlembaga (Waikar 2018).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi berkontribusi dalam membentuk dan memperkuat Islamofobia struktural di India.

Negara yang secara konstitusional merupakan negara sekuler kini menghadapi kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan mendukung ideologi Hindutva. Dengan menggunakan kerangka Islamofobia struktural, penelitian ini berupaya memahami bagaimana kebijakan dan praktik negara tidak hanya mencerminkan diskriminasi tetapi juga menormalisasi marginalisasi dalam struktur sosial dan politik India.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu "Bagaimana kebijakan dan praktik negara di bawah pemerintahan PM Narendra Modi membentuk Islamofobia struktural terhadap komunitas Muslim di India tahun 2019-2024?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kebijakan negara yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok Muslim.
2. Menganalisis peran negara melalui kebijakan dan praktik pemerintahan PM Narendra Modi dalam membentuk dan memperkuat Islamofobia struktural di India tahun 2019-2024.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada fenomena Islamofobia di India selama masa pemerintahan PM Narendra Modi, khususnya pada periode 2019-2024. Dimana pada periode 2014-2019 Modi dianggap telah menjalankan politik *dog-whistle*

yang secara tidak langsung menyebabkan peningkatan kekerasan komunal terhadap kelompok Muslim. Kemudian pada tahun 2019-2024 agenda hindutva semakin menguat yang diikuti dengan pemberlakuan beberapa kebijakan kontroversial yang dianggap dapat memperkuat diskriminasi terhadap Muslim dan memburuknya isu Islamofobia di India. Peneliti menggunakan perspektif Islamofobia struktural yang dikemukakan oleh Khaled A. Beydoun untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan praktik pemerintahan menjadi sarana marjinalisasi terhadap kelompok Muslim. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu terhadap kebijakan seperti CAA, NRC dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berdampak langsung terhadap kelompok Muslim. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah pengaruh ideologi Hindutva dan peran institusi sosial dalam memperkuat stereotip serta diskriminasi terhadap kelompok Muslim India. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui analisis literatur dan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sumber informasi didapatkan dari beberapa jurnal, yaitu:

Pertama, penelitian oleh Prashant Waikar, penelitian ini menjelaskan bahwa Narendra Modi secara aktif mempromosikan Islamofobia melalui pidato ataupun wawancara politiknya. Modi menggambarkan Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan maka menempatkan umat Hindu sebagai kelompok yang membawa perdamaian. Propaganda Islamofobia kemudian diperkuat oleh para

pendukung ideologi Hindutva. Waikar juga menekankan bahwa sikap rasisme yang muncul di kalangan mereka yang sangat mendukung ideologi Hindutva tidak terlepas dari konsep hierarki rasial yang telah terbentuk di diri umat hindu sejak lama (Waikar 2018).

Kedua, penelitian oleh oleh Bastian Yunariono, penelitian ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya konflik antar agama di India, terutama kelompok Muslim dan Hindu. Menurut Yunariono, kepemimpinan PM Narendra Modi dan BJP memiliki peranan besar dalam menormalisasikan kekerasan dan diskriminasi terhadap retorika dan kebijakan politiknya (Yunariono 2023).

Ketiga, penelitian oleh Amarnath Amarasingam, Sanober Umar, dan Shweta Desai, penelitian ini menjelaskan bahwa situasi sosial dan politik di India saat ini sangat dipengaruhi oleh narasi nasionalisme Hindu dan sentimen anti-Muslim yang didorong oleh kelompok-kelompok sayap kanan dan partai politik seperti BJP. Narasi ini sering kali diperkaya dengan disinformasi dan propaganda di media sosial, yang digunakan untuk memobilisasi dukungan terhadap kebijakan diskriminatif, seperti *anti-conversion laws* dan larangan *inter-religious* marriage, serta untuk menyebarkan ketakutan dan kebencian terhadap komunitas Muslim. Insiden kekerasan, seperti kerusuhan Delhi dan kampanye *Love Jihad* (LJ), sering kali dimanipulasi untuk memperkuat narasi bahwa Muslim adalah ancaman internal maupun eksternal, termasuk melalui klaim palsu tentang hubungan dengan organisasi teroris seperti ISIS. Misinformasi ini tidak hanya memperburuk ketegangan antar agama, tetapi juga memperkuat upaya politik untuk marginalisasi komunitas Muslim dan memperkuat identitas Hindu nasionalis (Amarasingam dkk. 2022).

Berdasarkan kajian beberapa penelitian diatas, diketahui bahwa isu Islamofobia memang telah banyak dibahas dalam konteks India. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan negara sebagai latar belakang, dengan fokus utama pada wacana publik, ataupun kekerasan komunal. Pendekatan ini belum secara mendalam menjelaskan bagaimana kebijakan hukum, praktik institusional, dan retorika politik negara berperan aktif dalam memperkuat dan menormalisasi diskriminasi terhadap umat Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan konsep Islamofobia struktural milik Khaled A. Beydoun untuk menganalisis bagaimana negara, khususnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, berperan sebagai aktor utama dalam membentuk dan memperkuat meningkatnya Islamofobia di India, serta bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap komunitas Muslim.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Islamofobia struktural yang pertama kali diperkenalkan oleh Khaled A. Beydoun dalam bukunya yang berjudul *American Islamofobia: Understanding the Roots and Rise of Fear.* Beydoun mendeskripsikan Islamofobia struktural sebagai bentuk diskriminasi terhadap Muslim yang dilembagakan melalui kebijakan negara, hukum, program, dan struktur sosial yang berasal dari ketakutan atau kecurigaan dalam institusi pemerintahan yang menganggap Muslim sebagai ancaman negara (Beydoun 2018).

Islamofobia terbagi menjadi tiga bentuk yang saling berkaitan, yaitu Islamofobia individu, struktural, dan dialektika. Dari ketiga bentuk tersebut, Islamofobia struktural dianggap sebagai bentuk Islamofobia yang paling mendasar,

karena tertanam dalam struktur dan kebijakan negara. Bentuk ini terjadi ketika diskriminasi terhadap Muslim dilegitimasi oleh negara melalui hukum, program, serta praktik institusional yang memandang Muslim sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai aktor utama dalam yang tidak hanya menciptakan kebijakan diskriminatif, tetapi juga mampu membentuk opini publik yang memperkuat sentimen anti-Muslim di masyarakat (Beydoun 2018).

Adapun indikator Islamofobia struktural menurut Beydoun, yaitu :

1. **Kebijakan dan Hukum Diskriminatif.** Negara seringkali memanfaatkan kerangka hukum sebagai sarana untuk melegitimasi dan menormalisasi diskriminasi terhadap kelompok Muslim. Meskipun kebijakan yang diberlakukan tampak netral, namun, dalam prakteknya kebijakan tersebut kerap menimbulkan dampak yang merugikan kelompok minoritas, khususnya Muslim. Melalui kebijakan ini, negara secara tidak langsung memperkuat struktur sosial yang bersifat eksklusif dan menempatkan kelompok Muslim sebagai kelompok yang dianggap berbeda dan berbahaya.
2. **Retorika.** Retorika politik memiliki peranan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kelompok sosial tertentu, termasuk menciptakan citra negatif terhadap Muslim. Melalui wawancara serta pernyataan politik, aktor negara seringkali menggambarkan Muslim ataupun Islam sebagai kelompok yang berbahaya, ekstrimis, ataupun kelompok yang tidak sejalan dengan nilai-nilai nasional. Narasi semacam ini dapat menjadi alat legitimasi terhadap kebijakan yang diskriminatif serta memperkuat dukungan publik terhadap tindakan negara yang merugikan kelompok Muslim. Maka dari itu, retorika

politik menjadi instrumen ideologis yang menormalisasikan Islamofobia pada tingkat struktural.

3. **Pengawasan dan Represi.** Adanya pengawasan serta represi terhadap kelompok Muslim menjadi bukti nyata bagaimana peran negara dalam menormalisasi Islamofobia. Negara sering kali menerapkan kebijakan keamanan yang secara tidak adil menargetkan kelompok Muslim yang didasarkan pada kecurigaan terhadap potensi ancaman. Tindakan tersebut meliputi pengawasan terhadap aktivitas sosial maupun keagamaan, serta pembatasan ruang gerak yang dilakukan oleh aparat keamanan. praktik tersebut dapat memperkuat citra negatif bahwa umat Muslim merupakan kelompok yang harus diawasi dan menegaskan posisi kelompok Muslim sebagai kelompok yang selalu dicurigai dalam struktur sosial dan politik.

Penulis memilih untuk menggunakan konsep Islamofobia struktural dalam penelitian ini karena konsep ini relevan untuk menjelaskan bagaimana negara berperan dalam menyebabkan dan mendorong marjinalisasi terhadap Muslim, sehingga Islamofobia menjadi suatu hal yang dinormalisasikan dalam masyarakat. Negara tidak hanya membuat kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, tetapi juga mampu membentuk opini publik melalui narasi politik yang memperkuat sentimen anti-Muslim di masyarakat melalui wacana politik, penegak hukum, dan pengawasan terhadap Muslim.

1.7 Argumen Sementara

Narendra Modi merupakan kepala pemerintahan yang dianggap telah gagal dalam memberikan perlindungan yang adil terhadap seluruh masyarakatnya. Hal

tersebut dapat dilihat dari bagaimana ia telah memberlakukan beberapa kebijakan yang dimana kebijakan tersebut tampak netral, namun pada kenyataanya kebijakan tersebut secara tidak langsung telah menargetkan kelompok Muslim. Modi secara tidak adil menganggap Muslim sebagai masyarakat kelas dua dan menganggap mereka sebagai ancaman keamanan nasional. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah sebagai aktor struktural dalam memperburuk Islamofobia di India melalui kebijakan dan praktik negara dimana mereka seharusnya mendapatkan hak dan diperlakukan sama.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena Islamofobia struktural di India pada masa pemerintahan Narendra Modi 2019-2024. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis India sebagai unit analisis utama, dengan fokus pada kebijakan-kebijakan pemerintah, narasi politik, serta peran institusi sosial yang dianggap berkontribusi dalam penyebaran Islamofobia.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi fokus utama adalah pemerintahan India di bawah kepemimpinan Narendra Modi dengan fokus utama pada kebijakan dan praktik yang mempengaruhi kelompok Muslim. Sementara itu, Objek penelitian ini mencakup fenomena Islamofobia struktural yang terdapat dalam kebijakan negara, wacana politik, dan praktik sosial yang secara tidak langsung menunjukkan bentuk diskriminasi terhadap umat Muslim.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis gunakan yaitu *library research* dalam melakukan pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku, Jurnal Ilmiah, laporan lembaga resmi, media kredibel, serta dokumen resmi pemerintahan yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi untuk mendukung analisis fenomena Islamofobia struktural di India.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data ataupun informasi dari literatur dan sumber sekunder yang relevan. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan memahami bentuk-bentuk Islamofobia struktural yang muncul selama masa pemerintahan Narendra Modi, serta melihat bagaimana kebijakan dan wacana politik berperan dalam memperkuat diskriminasi terhadap kelompok Muslim.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1, akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab 2, menjelaskan awal mula muncul dan berkembangnya Islamofobia di India, perkembangan ideologi Hindutva, serta dinamika politik dan kepemimpinan PM Narendra Modi.

Bab 3, menyajikan analisis mendalam mengenai bentuk-bentuk Islamofobia struktural di India dengan menggunakan teori Islamofobia Struktural dari Khaled

A. Beydoun. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana kebijakan dan institusi sosial berperan dalam memperkuat diskriminasi terhadap umat Muslim.

Bab 4, berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

ISLAMOFOBIA DI INDIA DAN MASA KEPEMIMPINAN PM NARENDRA MODI

Bab ini akan membahas mengenai sejarah munculnya Islamofobia di India. Bagaimana masa pra-kolonial, khususnya pada masa dinasti Mughal yang dianggap menjadi awal mula munculnya ketegangan antara Muslim dan Hindu. ketegangan ini kemudian berlanjut dan semakin memburuk pada masa kolonialisme Inggris akibat dari beberapa kebijakan yang diterapkan. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai konsep sekularisme di India yang seringkali dianggap *pseudo-secularism* karena dalam praktiknya yang cenderung berpihak pada mayoritas Hindu dan perlahan ingin menerapkan ideologi Hindutva sebagai ideologi negara. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang dianggap merugikan umat Muslim.

2.1. Islamofobia di India

Islamofobia dapat didefinisikan sebagai adanya ketakutan dan kebencian terhadap Muslim yang menyebabkan munculnya tindakan provokatif dan intoleransi, seperti ancaman, kekerasan, penghasutan, dan intimidasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana hal tersebut dapat terjadi karena alasan institusional, ideologis, politik, maupun agama, yang kemudian berkembang menjadi bentuk rasisme yang bersifat struktural dan kultural (Awan dan Zempi 2020). Islamofobia tidak hanya hadir dalam bentuk prasangka atau tindakan individu, tetapi dapat juga berkembang melalui struktur sosial dan politik yang lebih luas. Adanya persepsi Muslim sebagai ancaman menyebabkan mereka seringkali dikecualikan dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses publik lainnya dan

dianggap sebagai kelompok terbelakang.

Dalam konteks India, bentuk yang paling relevan dan merugikan yaitu Islamofobia struktural. Negara dan/atau lembaga pemerintahan yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta menghormati hak-hak seluruh warga negaranya, menjadi aktor utama dalam membentuk dan menormalisasikan diskriminatif. Dimana hal tersebut dilakukan melalui penerapan hukum, kebijakan, hingga penerapan program pemerintah (Galan 2025). Di India, ketegangan antara Muslim dan Hindu merupakan isu lama yang saat ini masih sering direpresentasikan dalam berbagai narasi sejarah serta politik. Salah satunya yang merujuk pada masa Dinasti Mughal ke-6 yang dikenal menjalankan pemerintahannya sesuai dengan nilai agama Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah (Zalukhu 2024). Selama masa kepemimpinannya, Aurangzeb seringkali dibandingkan dengan periode pemerintahan Akbar yang menekankan prinsip toleransi melalui konsep *Din-e-Ilahi*, sehingga kebijakan Aurangzeb kerap dianggap kurang inklusif terhadap kelompok non-Muslim (Ali 2023).

Beberapa kebijakan pemerintahan Aurangzeb yang dianggap diskriminatif yaitu penerapan kembali sistem *Jizyah* bagi non-Muslim, pembatasan partisipasi non-Muslim dalam pemerintahan, penghancuran Kuil yang dianggap sebagai sarana politik, serta melarang segala bentuk perayaan keagamaan agama lain (Ali 2023). Kebijakan-kebijakan tersebut memicu kemarahan serta pemberontakan yang semakin meluas bahkan setelah wafatnya Aurangzeb. Hal tersebut kemudian menjadi pertanda kemunduran dinasti Mughal dan sering menjadi rujukan historis dalam narasi politik anti-Muslim saat ini (Lubis dkk. 2021).

Ketegangan antar agama semakin memburuk pada masa kolonialisme

Inggris, yang pertama kali tiba di India pada tahun 1608 melalui *East India Company* (EIC) sebagai perusahaan dagang yang kemudian lambat laun berubah menjadi kekuatan politik yang menguasai beberapa wilayah. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah India selama lebih dari satu abad, EIC kemudian dibubarkan setelah pecahnya Pemberontakan Sepoy pada tahun 1857. Pemberontakan tersebut bermula dari ketidakpuasan tentara India yang berasal dari kelompok Hindu dan Muslim dimana EIC telah menyita tanah para pemilik lahan dan menaikkan pajak tanah. Selain itu, adanya tindakan diskriminatif yang dianggap telah merendahkan tentara India melalui rumor penggunaan pelumas senapan yang mengandung lemak babi dan sapi, serta adanya kecurigaan bahwasanya EIC berusaha untuk melakukan konversi massal Hindu-Muslim ke agama kristen (Szczepanski 2025). Hal tersebut kemudian menyebabkan pemberontakan besar-besaran dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat India. Dimana hal ini kemudian dianggap sebagai persatuan yang dilakukan oleh masyarakat India untuk melawan penjajahan Inggris. Namun, pembubaran tersebut bukan berarti berakhirnya masa penguasaan Inggris di India, melainkan penanda dimulainya periode *British Raj*.

Selama masa *British Raj,* ketegangan antar agama semakin memburuk. Salah satu kebijakan Inggris yang memperburuk ketegangan tersebut yaitu kebijakan *divide and rule* (Siddiqui 2022). Kebijakan ini digunakan oleh Inggris untuk memecah belah masyarakat India ke dalam beberapa kelompok berdasarkan agama, kasta, dan etnis dengan tujuan untuk mencegah persatuan nasional yang sewaktu-waktu dapat mengancam kekuasaan Inggris serta untuk mempermudah Inggris menguasai dan mengendalikan masyarakat India. Melalui kebijakan

tersebut, Inggris memperkuat antagonisme antara Muslim dan Hindu dengan mengaitkan citra negatif Muslim pada masa pemerintahan Aurangzeb untuk menumbuhkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap kelompok Muslim.

Selain kebijakan *divide and rule,* Inggris juga menerapkan kebijakan *communal electorates,* yaitu pengelompokan pemilih dalam pemilihan umum berdasarkan agama (Siddiqui 2022). Kebijakan ini semakin memperkuat identitas keagamaan sebagai dasar mobilisasi politik dan menciptakan hierarki sosial yang menempatkan Muslim sebagai kelompok lain. Melalui kebijakan tersebut, negara kolonial menggunakan kekuasaan politik dan hukum untuk mengatur serta mengendalikan hubungan antar kelompok sosial demi mempertahankan kekuasaanya. Sejak saat itu, diskriminasi berbasis agama di India tidak lagi hanya hadir dalam bentuk struktural atau sosial, tetapi juga mulai terlembagakan melalui kebijakan dan struktur sosial-politik yang pengaruhnya masih dapat dilihat hingga masa pascakolonial.

Salah satu peristiwa yang sering dianggap memberikan dampak signifikan terhadap memburuknya hubungan Muslim-Hindu di India yaitu penghancuran Masjid Babri pada tahun 1992 oleh kelompok nasionalis Hindu dengan dalih bahwa Masjid dibangun diatas tanah kelahiran Dewa Rama dan akan digantikan dengan pembangunan kuil (Chakraborty 2024). Peristiwa tersebut memicu kerusuhan besar antara kelompok Muslim dan Hindu di berbagai wilayah India dan menyebabkan ratusan korban jiwa (Britannica 2025). Setelah kejadian tersebut, hubungan antara kedua agama tidak pernah membaik dan bahkan semakin memburuk, terutama setelah kerusuhan Gujarat tahun 2002 yang terjadi pada masa Narendra Modi ketika menjabat sebagai Kepala Menteri Gujarat, dimana berbagai laporan menyoroti

lemahnya tanggapan aparat negara dalam mencegah kekerasan terhadap komunitas (Hawaleshka 2023). Rangkaian peristiwa ini menjadi bukti nyata bagaimana pola pembiaran negara terhadap kekerasan berbasis agama dapat berkontribusi pada menguatnya sentimen anti-Muslim dalam kehidupan sosial dan politik di India.

Pada umumnya, sebagian besar masyarakat India beranggapan bahwa tingkat kebebasan beragama di negara tersebut sangatlah tinggi, terutama di wilayah yang didominasi oleh kelompok agama mayoritas (Sahgal dkk. 2021). Namun kenyataannya, kebebasan beragama tersebut tidak dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok agama. Di wilayah-wilayah dengan jumlah populasi Muslim yang relatif sedikit, justru seringkali menjadi saksi dari peningkatan ujaran kebencian dan praktik diskriminasi terhadap kelompok Muslim. Dimana peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran aktor-aktor politik yang menggunakan retorika keagamaan serta mendorong terbentuknya kebijakan yang berpihak kepada kelompok mayoritas demi mencapai kepentingan tertentu. Akibatnya ketimpangan sosial semakin menguat dan memperparah marginalisasi terhadap kelompok Muslim.

Marginalisasi terhadap komunitas Muslim di India dapat dilihat dari keterbatasan mereka dalam mengakses pendidikan, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, serta fasilitas publik lainnya hanya karena identitas keagamaan mereka (Ali 2023). Kondisi ini tidak terlepas karena rendahnya partisipasi politik umat Muslim, dimana keterwakilan mereka dalam struktur kekuasaan relatif terbatas, sementara banyak dari mereka yang tinggal di kawasan permukiman dengan infrastruktur dan pelayanan publik yang kurang memadai (Asmer 2024). Keadaan tersebut semakin diperparah oleh praktik politik, dimana seorang aktor negara

secara terang-terangan menormalisasi pengecualiaan Muslim dari dunia politik. Dapat dilihat dari pernyataan Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, yang menyatakan bahwa untuk memenangi pemilu yaitu dengan mengecualikan Muslim dari daftar kandidat (Asmer 2024).

Namun, tindakan diskriminatif terhadap kelompok Muslim ini tidak secara merata terjadi di seluruh penjuru India melainkan hanya terjadi di beberapa negara bagian khususnya Utara India yang dikuasai oleh BJP. Dimana isu Islamofobia di wilayah tersebut seringkali diperburuk melalui tindakan dan/atau narasi kebencian yang disebarkan langsung oleh para pejabat pemerintahan. Hal ini dapat dilihat di beberapa wilayah seperti Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, dan Assam yang tercatat mengalami peningkatan kasus Islamofobia berupa diskriminasi, ujaran kebencian, dan kekerasan komunal terhadap kelompok Muslim (Khan dan Zernab 2024). Di wilayah-wilayah tersebut, Muslim kerap kali menjadi sasaran kekerasan, penggusuran, hingga pengusiran yang dilakukan oleh otoritas pemerintah setempat, seringkali dengan dalih penertiban pembangunan ilegal atau alasan keamanan. Dimana pada tahun 2022-2023, terdapat setidaknya 153.000 properti Muslim yang dihancurkan akibat dari adanya *bulldozer politics* (Krishnan 2024).

Selain pengusiran, kelompok Muslim juga menjadi korban diskriminatif lainnya, seperti di Assam misalnya, pada tahun 2022 pemerintah Assam melarang pengoperasian semua sekolah Islam negeri dengan alasan anak-anak harus menjadi profesional bukan imam, siapapun yang berbahasa Bengali akan dianggap sebagai orang asin meskipun mereka penduduk asli, penggusuran paksa desa Muslim seluas 25.000 hektar. Hal serupa juga terjadi di Uttar Pradesh yang merupakan tempat tinggal bagi 40 juta Muslim. Dimana pada tahun 2021 sebuah masjid berusia 100

tahun dihancurkan oleh kelompok Hindu radikal dan adanya kampanye kebencian terhadap siapapun yang berbahasa Urdu karena bahasa Urdu dan Bengali dianggap sebagai bahasa Muslim (Bridge Initiative 2022).

Setelah mengalami penggusuran, Mereka juga menghadapi masalah lainnya seperti sulitnya membeli ataupun menyewa properti terutama di wilayah mayoritas Hindu (Khan 2023). Praktik tersebut membuktikan bagaimana kekerasan terhadap Muslim tidak hanya ditoleransi, tetapi juga dilegitimasi melalui kebijakan dan tindakan negara. Situasi ini menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang menempatkan komunitas Muslim dalam posisi yang rentan dan subordinat dalam struktur sosial dan politik di India.

2.2. Faktor Hindutva terhadap peningkatan Islamophobia di India

Menguatnya ideologi Hindutva di India menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan praktek Islamophobia di India, terutama sejak BJP berada dalam posisi dominan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Istilah Hindutva pertama kali diperkenalkan oleh Vinayak Damodar Savarkar dalam bukunya yang berjudul *Hindutva: who is a hindu?* (Banik 2022). Menurut Savarkar, Hindutva merupakan ideologi politik yang menegaskan bahwa identitas nasional India harus berdasarkan pada budaya, keturunan, serta wilayah yang memiliki keterkaitan dengan tanah air serta warisan Hindu. Ia juga mendefinisikan seseorang sebagai bagian dari bangsa India hanya jika mereka memenuhi tiga pilar utama, yaitu tanah kelahiran (*matrabhumi*), tanah nenek moyang (*pitrbhumi*) dan tempat suci (*punya bhumi*) (Banik 2022).

Hindutva merupakan ideologi nasionalisme Hindu yang bersifat eksklusif, yang memandang Muslim dan Kristen sebagai kelompok lain karena tempat suci

agama mereka berada di luar wilayah India, yaitu di Mekkah dan Betlehem. Sebaliknya, agama-agama seperti Hindu, Jainisme, Sikhisme, dan Buddhisme diposisikan sebagai agama asli yang lahir dan berkembang di wilayah India (Zishan dkk. 2022).

Ideologi Hindutva mulai berkembang secara signifikan ketika RSS yang merupakan organisasi nasionalis Hindu sayap kanan didirikan pada tahun 1925. Seiring waktu, RSS menjadi basis ideologis bagi BJP, partai politik yang saat ini dipimpin oleh Narendra Modi (Zishan dkk. 2022). Melalui politisasi agama Hindu, RSS berupaya untuk melindungi hak dan kepentingan kelompok Hindu serta mendorong terbentuknya *Hindu Rashtra* atau negara Hindu (Agrawal 2024). Keterkaitan antara RSS dan BJP menunjukkan bagaimana ideologi Hindutva tidak hanya berkembang sebagai wacana kultural, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam praktik dan arah politik negara.

Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri, Narendra Modi merupakan anggota aktif RSS dan menjabat sebagai Menteri Utama Gujarat sejak tahun 2001 (Hawaleshka 2023). Selama masa kepemimpinannya di Gujarat, ideologi Hindutva semakin terlihat dalam praktik pemerintahannya (Hassan dan Ellis-Petersen 2023). Salah satunya yaitu pada saat kerusuhan Gujarat 2002. Kerusuhan tersebut merupakan kerusuhan komunal besar yang diikuti dengan adanya sentimen anti-Muslim yang menewaskan setidaknya 1.000 orang, dengan 790 korban merupakan Muslim. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pemerintah daerah saat itu dinilai gagal mengambil langkah atau upaya untuk menghentikan kekerasan, bahkan adanya dugaan pemerintah setempat memerintahkan aparat keamanan untuk tidak menghalangi ataupun menghentikan aksi tersebut (Genocide Watch 2023; Pathi dan

Saaliq 2024). Peristiwa ini memperkuat pandangan bahwa Modi merupakan politisi yang menggunakan kekuasaan dengan mengaitkannya dengan ideologi Hindutva.

Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri India, berbagai laporan menunjukkan adanya peningkatan ancaman serta tindakan diskriminatif yang menyasar kelompok Muslim secara langsung (Hawaleshka 2023). Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang diberlakukan, seperti pencabutan pasal 370 dan 35A, pemberlakuan CAA dan NRC, UU anti-konversi, dan sebagainya. Selain melalui kebijakan formal, komunitas Muslim juga menghadapi peningkatan ancaman kekerasan dan praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok radikal Hindu, seperti melalui tuduhan *love jihad* hanya karena identitas keagamaannya. Situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan negara dan dinamika politik pada masa pemerintahan Narendra Modi berkontribusi pada terbentuknya lingkungan sosial dan politik yang semakin tidak aman terhadap kelompok Muslim.

Meskipun selama masa pemerintahannya, Narendra Modi mendapatkan banyak kritikan karena dianggap telah mendorong peningkatan kekerasan terhadap kelompok minoritas, ia juga berupaya membangun dan mempertahankan citranya sebagai seorang pemimpin dengan pembangunan nasional melalui berbagai program sosial dan ekonomi (Jathol dkk. 2019). Dalam beberapa kesempatan, Modi seringkali menyampaikan kepeduliannya terhadap komunitas Muslim, salah satunya melalui pemberlakuan program *Saugat-e-Modi*, yaitu pembagian hadiah menjelang hari raya yang ditujukan untuk pemilih Muslim. Keberhasilan Modi dalam memenangkan pemilihan umum tahun 2024 menunjukkan bahwa popularitas Modi sebagian besar dibangun melalui retorika nasionalistik dan politik identitas mayoritas Hindu yang sejalan dengan ideologi Hindutva (Selvaraj 2024).

Pendukung ideologi Hindutva berpendapat bahwa ideologi ini bertujuan untuk melindungi warisan Hindu dari ancaman eksternal serta memperkuat identitas nasional India berdasarkan nilai-nilai Hindu (Sen 2022). Namun, dalam praktiknya, penguatan ideologi ini justru menimbulkan kekhawatiran terhadap keberadaan serta pemenuhan hak-hak kelompok minoritas, khususnya komunitas Muslim (Zishan dkk. 2022).

BAB 3

ANALISIS ISLAMOFOBIA DI INDIA DALAM PERSPEKTIF ISLAMOFOBIA STRUKTURAL

Dalam perspektif Islamofobia Struktural yang dikemukakan Khaled A. Beydoun, negara dipahami sebagai aktor utama dalam membentuk, memproduksi, dan normalisasi Islamofobia melalui hukum, kebijakan, serta praktik institusional yang melibatkan pejabat publik serta penegak hukum (Beydoun 2018). Pendekatan ini menekankan bahwa diskriminasi terhadap Muslim tidak hanya muncul dari prasangka sosial, tetapi juga dilembagakan secara sistematis melalui mekanisme negara yang bersifat legal dan politis. Berdasarkan kerangka tersebut, bab ini akan menganalisis pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi pada periode 2019-2024 merefleksikan praktik Islamofobia struktural melalui (i) kebijakan dan hukum negara, (ii) retorika politik, (iii) praktik pengawasan dan represi terhadap komunitas Muslim di India.

3.1. Kebijakan dan Hukum Diskriminatif

Dalam perspektif Islamofobia struktural Khaled A. Beydoun, hukum dan kebijakan negara berfungsi sebagai instrumen utama dalam menormalisasi diskriminasi terhadap kelompok Muslim (Beydoun 2018). Dalam konteks India, kebijakan dan hukum yang diberlakukan di bawah pemerintahan PM Narendra Modi dan BJP menunjukkan pola penggunaan hukum yang memperkuat nasionalisme Hindu berbasis ideologi Hindutva, dengan dampak yang secara signifikan merugikan komunitas Muslim (Human Rights Watch 2021; Zishan dkk. 2022).

Pada tahun 2019, ketika Narendra Modi memimpin India untuk ke-2 kalinya, Modi mengatakan dalam pidato kemenangannya bahwasanya ia akan melindungi kaum minoritas. Namun, pada kenyataanya BJP sendirilah yang secara terang-terangan mendorong umat Hindu untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok Muslim (Zishan dkk. 2022). Terdapat beberapa kebijakan serta hukum yang kemudian diberlakukan beberapa bulan setelah Modi resmi menjadi Perdana Menteri India, yaitu: (i) Pencabutan Pasal 370 dan Pasal 35A. (ii) *Citizenship Amendment Act,* 2019 (CAA). (iii) *National Register of Citizens* (NRC). (iv) *Anti-Conversion law.*

3.1.1 Pencabutan Pasal 370 dan Pasal 35A

Jammu dan Kashmir (J&K) menjadi bagian dari India sejak tahun 1947, setelah Maharaja Hari Singh yang merupakan penguasa terakhir J&K, menandatangani *Instrument of Accession* (IoA) yang menyatakan bergabung dengan India secara terbatas dan bersyarat (Vora 2023). Keputusan ini diambil ketika wilayah J&K mengalami invasi yang dilakukan oleh milisi bersenjata yang didukung pemerintah Pakistan. Penandatanganan IoA merupakan bentuk kesepakatan politik antara pemerintah pusat India dan penguasa J&K, dimana India memberikan bantuan serta perlindungan militer dengan imbalan integrasi secara terbatas. Selain itu, pasal 370 juga ditambahkan kedalam Konstitusi India sebagai upaya untuk memberikan status khusus dan otonomi terhadap J&K (Awasthi 2023).

Pasal 370 mulai berlaku sebagai bagian dari Konstitusi India pada tanggal 26 Januari 1950. Pasal ini memberikan J&K kebebasan penuh secara internal yang memungkinnya untuk memiliki konstitusi sendiri, bendera negara, dan kendali atas

administrasi internal. Namun, kewenangan tersebut dikecualikan dalam tiga bidang, yaitu pertahanan, hubungan luar negeri, dan komunikasi yang tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat (Awasthi 2023). Untuk memperkuat otonomi J&K, pemerintah negara bagian J&K mengeluarkan kebijakan mengenai *permanent residents* serta hak istimewa, seperti kepemilikan properti serta akses pekerjaan hanya kepada penduduk asli J&K. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat secara konstitusional melalui Pasal 35A melalui *The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) order, 1954* pada tanggal 14 Mei 1954 oleh Rajendra Prasad yang merupakan Presiden India saat itu dengan persetujuan Majelis Konstituante Jammu dan Kashmir. Ketentuan ini secara khusus berfungsi sebagai mekanisme perlindungan demografis bagi penduduk lokal J&K yang mayoritas beragama Islam.

Namun, keberadaan Pasal 370 dan 35A kemudian menjadi isu dalam politik India. Sejak tahun 2014, pemimpin BJP yang dipengaruhi oleh ideologi Hindutva, secara terang-terangan mengatakan bahwasanya pemberian status otonomi kepada J&K berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti terhambatnya penegakan hukum di wilayah J&K hingga adanya kemungkinan menjadi wadah untuk J&K mempromosikan terorisme dan separatisme (Bhoi 2024). Narasi ini membingkai J&K sebagai wilayah bermasalah yang membutuhkan kontrol negara yang lebih kuat. BJP juga menyatakan bahwa pencabutan pasal 370 bertujuan untuk mendorong persatuan serta integrasi seluruh wilayah India (Khurana 2024). Oleh karena itu, BJP secara konsisten mengadvokasi pencabutan Pasal 370 dan 35A dengan alasan memperkuat kendali pemerintah pusat di wilayah J&K, mempercepat integrasi nasional, serta menjaga kedaulatan India di wilayah

perbatasan yang dianggap rentan terhadap ancaman eksternal (Bhoi 2024).

Pada tahun 2019, setelah kemenangan BJP dalam pemilu, Pasal 370 dan 35A dicabut melalui perintah Presiden Ramnath Kovind dalam *Constitutional Order* 272 dan 273. Mahkamah Agung India menyatakan bahwa status khusus yang dimiliki oleh J&K hanyalah ketentuan sementara karena kondisi konflik bersenjata pada masa integrasi India. Oleh karena itu, pada 5 Agustus 2019, Pasal 370 dan 35A secara resmi dicabut secara konstitusional (Al Jazeera 2023). Pencabutan tersebut sekaligus sebagai tanda berakhirnya status khusus J&K serta membuka jalan bagi pemerintah pusat untuk menerapkan hukum nasional secara penuh di wilayah tersebut tanpa adanya pengecualian. Keputusan ini membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi di wilayah J&K, terutama bagi masyarakat Muslim yang selama ini dilindungi oleh status otonomi tersebut.

Setelah Pasal 370 dan 35A resmi dicabut, pemerintah India memberlakukan *Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019* yang mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019. Undang-Undang ini mereorganisasi wilayah J&K menjadi dua *Union Territories* yaitu Jammu & Kashmir dan Ladakh. Pemerintah India mengklaim bahwa penataan ulang tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah J&K ke dalam sistem hukum nasional dan memperkuat integritas politik negara sesuai yang terdapat dalam *the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order*. Selain itu, kebijakan ini juga dinyatakan oleh pemerintah India sebagai upaya untuk mengatasi masalah ketidakstabilan politik, separatisme, dan keterbelakangan ekonomi di wilayah tersebut. Serta reorganisasi ini juga diharapkan dapat menciptakan perdamaian,

stabilitas, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah J&K (Awasthi 2023).

Akan tetapi, pencabutan Pasal 370 dan 35A mendapatkan banyak kecaman dari kelompok Muslim dimana wilayah J&K juga merupakan satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India. Maka dari itu adanya pencabutan tersebut menimbulkan persepsi bahwasanya pencabutan kedua pasal merupakan langkah awal dari upaya pemerintah untuk mengubah demografi J&K melalui pembukaan akses migrasi penduduk ke wilayah J&K untuk tinggal dan bekerja serta membeli tanah. Hal tersebut semakin diperkuat setelah pemerintah mengesahkan *the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Fifth Order, 2020* (Khan 2020). Kebijakan tersebut telah mengubah kebijakan mengenai pertanahan dimana siapapun dapat membeli atau menyewa tanah di wilayah tersebut dan melegalkan sistem penguasaan tanah kolonial yang dikuasai oleh mayoritas Muslim. Penguasaan tanah ini dilakukan oleh Hindu dimana mereka menggap adanya korupsi yang dilakukan oleh kelompok Muslim sehingga menyebabkan pengusiran paksa terhadap kelompok Muslim dari tanahnya sendiri (Zargar dan Osuri 2024). Sejak pencabutan pasal 370 hingga 2025 terdapat setidaknya 631 non-resident yang telah membeli lebih dari 195.261 meter persegi tanah di wilayah J&K dan dipastikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun (Wani 2025).

Wilayah J&K yang saat ini merupakan wilayah dalam pengembangan telah berhasil menarik para investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Hingga saat ini terdapat setidaknya 1.559 perusahaan baik lokal maupun multinasional untuk membangun perkantoran, perumahan, pusat perbelanjaan, manufaktur dan sebagainya. Pemerintah India sendiri telah menetapkan 625 hektar tanah di wilayah Kashmir untuk mendukung pembangunan di bekas wilayah J&K (Zargar dan Osuri

2024). Selain itu, setelah pencabutan *Permanent Residents,* pada tahun 2020, pemerintah pusat memberikan setidaknya 55.931 sertifikat domisili kepada *West Pakistan Residents* (WPR) yang telah menetap di J&K sejak tahun 1947. Mereka diantaranya berasal dari kelompok Valmikis, Gurkha, dan kelompok hindu lainnya (Zargar 2021).

Tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah tersebut dianggap sebagai bagian dari agenda Hindutva. Dimana pemerintah telah menghina kelompok Muslim dalam berbagai pidatonya dengan menganggap mereka sebagai ancaman terhadap keamanan. Maka dari itu, guna mencegah ancaman terjadi, pemerintah India berupaya untuk mengintegrasikan wilayah J&K dengan melakukan pencabutan Pasal 370 dan 35A. Setelah pencabutan dilakukan, identitas asli J&K yang erat dengan Muslim perlahan tergantikan dengan masuknya Masyarakat non-Muslim khususnya Hindu, adanya promosi ziarah kuil kuno Hindu ke Kashmir yang dilakukan oleh BJP, perebutan tanah Muslim, dan pemberian status domisili kepada WPR yang mayoritas Hindu (Veracini 2022; H. Zargar dan Osuri 2024).

Pencabutan Pasal 370 dan 35A juga menyebabkan ruang gerak masyarakat Muslim J&K menjadi sangat dibatasi. Seperti adanya pelarangan perayaan Idul Adha serta mengumandangkan Adzan dimana hal tersebut telah melanggar hak kebebasan beragama (UN 2019). Muslim yang merupakan kelompok mayoritas di wilayah J&K seringkali dipandang sebagai kelompok rendahan dan sulit diatur. Maka untuk menertibkan dan mengendalikan mereka, pemerintah pusat semakin memperketat pengawasan terhadap kelompok Muslim yang dianggap telah melanggar hak fundamental masyarakat dengan menerapkan *Armed Forces*

(Special Powers) Act (AFSPA) dan *Public Safety Act* (PSA). Dimana kedua hukum tersebut memberikan kekuasaan terhadap aparat keamanan serta lembaga penegak hukum untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penembakan terhadap masyarakat J&K terutama Muslim (Thakur 2024). Sesuai yang tertulis dalam Section 4(a) dan 4(b) *Armed Forces (Special Powers) Act* (AFSPA) 1958 dan Section 8 *Public Safety Act* (PSA) 1978.

Tindakan yang dilakukan pemerintah India tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan tindakan kekerasan, seperti pengerahan aparat keamanan sebanyak 231.000 pasukan yang diturunkan secara bertahap, pengamanan yang ketat, penahanan kurang lebih 500 orang *Jemaat-e-Islami* beserta 5000 aktivis lainnya (Al Jazeera 2023). Kasus penangkapan dibawah PSA tanpa adanya bukti dan bahkan alasan yang jelas terjadi paling banyak di wilayah Srinagar, Kashmir dengan total tujuh kali lipat lebih banyak dibandingkan di wilayah Jammu yang di dominasi Hindu. Sehingga diyakini bahwasanya pengamanan di wilayah J&K hanya berfokus untuk memantau pergerakan kelompok Muslim (Amnesty International 2024)

Menurut Omar Abdullah yang merupakan mantan Menteri Utama J&K, penghapusan ini merupakan bentuk pengkhianatan pemerintah pusat terhadap J&K serta keputusan yang tidak konstitusional yang dapat menimbulkan kerusuhan di wilayah J&K terutama setelah pemerintah menurunkan aparat keamanan dengan tujuan menjaga perdamaian di wilayah tersebut terutama pada saat pencabutan Pasal 370 (Verma 2019; Philip 2019). Selain itu, melalui narasi keamanan nasional dan integrasi wilayah, melalui pencabutan Pasal 370 dan 35A dianggap sebagai langkah menyelamatkan wilayah J&K dari ancaman keamanan serta mendukung

pembangunan di wilayah tersebut (Nisa 2025). Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini secara sistemik mengikis hak dan perlindungan hukum terhadap komunitas Muslim di Jammu dan Kashmir serta membuka ruang bagi rekayasa demografis dan kontrol politik yang tidak proporsional (Awais 2025).

3.1.2 *National Register of Citizens* (NRC)

National Register of Citizen atau NRC merupakan kebijakan yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1951 dengan tujuan untuk mengidentifikasi warga negara India dan mendeportasi imigran ilegal. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap migrasi besar-besaran yang terjadi setelah pembagian wilayah India dan Pakistan pada tahun 1947 (Menon 2023). Pada awal pembentukannya, NRC bersifat administratif dan tidak secara eksplisit berbasis agama. Assam, yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Pakistan Timur yang sekarang Bangladesh, menjadi jalur masuk utama bagi pengungsi terutama komunitas Hindu Bengali, pasca perang Indo-Pakistan tahun 1971 (Tippabhatla 2021).

Meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke Assam menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat Assam, sehingga sentimen anti-imigran mulai berkembang pada tahun 1970. Sentimen ini didorong oleh anggapan bahwa para pendatang tersebut dapat mengancam identitas budaya, bahasa, serta peluang ekonomi masyarakat Assam (Menon 2023). Pada tahun 1971-1985, mahasiswa Assam yang tergabung dalam *All Assam Students' Union* (AASU) bersama dengan *All Assam Gana Sangram Parishad* (AAGSP) melancarkan serangkaian protes yang dikenal sebagai *Assam Movement,* melakukan serangkaian protes menuntut pemerintah India untuk segera mengidentifikasi serta mendeportasi imigran ilegal

(CSAP 2025). Mereka berpendapat keberadaan imigran tidak hanya mengancam identitas Assam, tetapi juga menyebabkan meningkatnya pengangguran di kalangan penduduk lokal. Tekanan politik tersebut mendorong negara untuk menanggapi melalui mekanisme hukum. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah India melakukan negosiasi bersama dengan perwakilan *Assam Movement* yang kemudian menghasilkan *Assam Accord 1985* (SCO 2024; D'Souza 2023).

Assam Accord menghasilkan dua aspek terkait kewarganegaraan. Pertama, penetapan batas kelayakan kewarganegaraan melalui naturalisasi, yang berdasarkan tahun migrasi ke India sebelum tahun 1966. Kedua, perubahan aturan kewarganegaraan berdasarkan tahun kelahiran sebelum tahun 1987 tanpa memandang status kewarganegaraan orang tua mereka (Jayal 2022). Meskipun kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam meredakan ketegangan sosial di Assam, pengimplementasiannya tidak berjalan efektif selama beberapa dekade.

Hingga pada tahun 2013, Mahkamah Agung India mengambil alih proses tersebut dan memerintahkan pemerintah Assam untuk memperbaharui NRC. Selama proses pembaharuan tersebut, setiap penduduk Assam wajib membuktikan bahwa mereka ataupun leluhur mereka telah tinggal di India sebelum 24 Maret 1971 sesuai dengan pasal 6A Undang-Undang Kewarganegaraan (Vajiram & Ravi 2025; Choudhury 2023). Himanta Biswa Sarma yang merupakan Menteri Utama Gujarat menyatakan bahwasanya terdapat 1,9 juta penduduk yang dikeluarkan dalam draft akhir NRC, dimana sekitar 36,8% merupakan Muslim, 26,3% Hindu bengal, 10,5% Hindu, 7,9% Gurkha, dan 18,4 kelompok lain (The Wire 2024).

Disaat masalah NRC di Assam belum sepenuhnya terselesaikan, Amit Shah yang merupakan Menteri Dalam Negeri India mengusulkan pengimplementasian

NRC tidak hanya di Assam melainkan secara nasional dan memastikan akan melakukan deportasi terhadap semua imigran ilegal sebelum pemilihan Lok Sabha tahun 2024 (Korobi 2024). Selama masa kampanye berlangsung, alih–alih menggunakan kata imigran ilegal, Amit Shah memilih menggunakan kata penyusup yang merujuk kepada Muslim Rohingnya dan Bangladesh, serta menggambarkan mereka sebagai kelompok berbahaya (Hindutva Watch 2024).

Meskipun secara formal kebijakan tersebut terlihat netral, dalam praktiknya memberikan dampak yang tidak adil terhadap komunitas Muslim, banyak dari mereka yang berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu mendaftarkan kelahiran serta memberikan dokumen yang membuktikan keberadaan mereka ataupun leluhur mereka di Assam sebelum tahun 1971 (Sahoo 2025). Namun, beberapa dari mereka yang mampu membuktikan dokumen kependudukannya tetap dikecualikan dalam daftar NRC, dengan berbagai alasan seperti dokumen yang tidak lengkap atau bahkan dokumen yang diberikan dianggap palsu. Sehingga NRC berfungsi sebagai mekanisme sistematis untuk mengecualikan Muslim dari kelompok yang berhak untuk mendapatkan perlindungan negara serta menjadikan kelompok Muslim menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan status kewarganegaraan (Siddique dan Ramachandran 2024).

Adapun dokumen yang dibutuhkan yaitu dokumen tanah, sertifikat kewarganegaraan atau tempat tinggal tetap, sertifikat yang dikeluarkan pemerintah, riwayat pekerjaan, rekening bank, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, sertifikat pendidikan, dan bukti pembayaran pajak atau pendapatan tanah. Selain kelompok Muslim, kelompok Hindu dan suku asli juga tidak mampu memenuhi dokumen yang dibutuhkan. Namun, hanya kelompok

Muslim saja yang sering mendapatkan diskriminasi dan dilaporkan sebagai ke *Foreigners Tribunal* yang ada di Assam. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya narasi BJP yang mengatakan bahwasanya nasionalisme budaya India adalah penawar paling ampuh untuk separatisme dan perpecahan dimana Muslim merupakan penyebar separatisme yang menyebabkan lahirnya Pakistan (Saikia 2019).

Meskipun NRC tidak secara langsung menargetkan kelompok Muslim. Namun, dalam prakteknya, kebijakan ini dianggap diskriminatif karena dianggap tidak adil terhadap kelompok Muslim yang merupakan mayoritas di beberapa wilayah di Assam (Bajoria 2020). NRC menunjukkan bagaimana negara menggunakan hukum yang tampak netral namun pada kenyataannya telah melakukan diskriminasi berdasarkan agama yang menyebabkan banyak Muslim yang harus kehilangan kewarganegaraanya (Daniyal 2020).

Kekhawatiran tersebut semakin menguat dengan adanya pemberlakuan CAA, dimana apabila NRC dan CAA digunakan secara bersamaan maka kebijakan ini dapat mengancam kewarganegaraan Muslim india. Dimana NRC berperan sebagai instrumen yang mencabut kewarganegaraan, sementara CAA sebagai filter berbasis agama yang memberikan perlindungan eksklusif kepada non-Muslim (Anand 2020). Adanya penggabungan kedua kebijakan ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan hukum dan kebijakan sebagai alat seleksi kewarganegaraan berdasarkan identitas agama, sehingga menempatkan Muslim sebagai kelompok kelas dua yang secara struktural tidak diinginkan di India (Singh 2024b).

3.1.3 *Citizenship Amendment Act,* 2019 (CAA)

Sejak *Citizenship Amendment Act* (CAA) disahkan pada Desember 2019 oleh Parlemen India, Undang-Undang ini menjadi salah satu kebijakan yang paling kontroversial dalam politik India (Chandrachud 2020). Sebelum CAA diberlakukan, proses naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan India mensyaratkan masa tinggal minimal 11 tahun sesuai dengan ketentuan *Citizenship Act, 1955* (Al Jazeera 2024). Namun, CAA memberikan pengecualian khusus bagi kelompok minoritas non-Muslim yang berasal dari negara mayoritas Muslim, seperti Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang telah ada di India sebelum 31 Desember 2014 untuk mendapatkan percepatan kewarganegaraan (Amnesty International 2024; Al Jazeera 2024).

Menurut BJP, pengesahan Undang-Undang ini bukanlah tanpa alasan, melainkan untuk memberi perlindungan terhadap mereka yang mendapatkan penindasan di negara asalnya (Amnesty International 2024). Namun, klaim perlindungan tersebut menuai banyak kritik, karena CAA secara eksplisit mengecualikan kelompok Muslim yang juga mengalami penganiayaan di negara-negara lain, seperti Muslim Rohingya di Myanmar, Muslim Tamil di Sri Lanka, serta komunitas Muslim di Bhutan, dan wilayah lainnya (Amnesty International 2024b). Keberadaan CAA juga dianggap tidak sejalan dengan Pasal 14 Konstitusi India yang menjamin kesetaraan dihadapan hukum yang mengakibatkan banyaknya tuduhan dari partai oposisi, masyarakat India, hingga organisasi internasional yang menilai bahwa CAA merupakan kebijakan yang diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip sekularisme India (Chandrachud 2020).

Secara konstitusional, India merupakan negara sekuler sebagaimana

ditegaskan dalam Amandemen Konstitusi tahun 1976 yang menyatakan bahwa India merupakan negara republik yang berdaulat, sosialis, sekuler dan demokratis (Agrawal 2024). Namun, sejak PM Narendra Modi menjabat, prinsip sekularisme tersebut perlahan tergerus seiring menguatnya kekuasaan BJP yang berideologi Hindutva. Keterkaitan erat antara BJP dan organisasi RSS telah mendorong berkemangnya politik identitas berbasis agama, yang dalam prakteknya sering memposisikan Muslim sebagai kelompok lain atau orang luar dari identitas nasional India (Chandrachud 2020).

Menurut Asaduddin Owaisi yang merupakan salah satu anggota Lok Sabha sekaligus ketua *All India Majelis-e-Ittehadul Muslimeen* (AIMIM), CAA merupakan kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan hak atas kesetaraan dengan mengecualikan Muslim dari daftar penerima kewarganegaraan. Ia juga berpendapat bahwa pemerintah sengaja menerapkan kebijakan ini hanya untuk menargetkan kelompok Muslim (Hindustan Times 2024; The Hindu 2024). Selain Owaisi, Yogendra Yadav yang seorang aktivis India, berpendapat bahwa CAA tidak hanya berfungsi sebagai hukum semata, melainkan merupakan bagian dari strategi politik identitas berbasis agama yang dijalankan oleh negara dengan menempatkan Muslim sebagai masyarakat kelas dua (Khrisnan 2024).

Adanya kebijakan ini menunjukkan bagaimana negara telah secara aktif memilih dan memprioritaskan kelompok agama tertentu melalui hukum. Oleh karena itu, kebijakan ini menyebabkan pengimplementasian sekularisme di India seringkali dianggap semu atau *pseudo-secularism,* yaitu praktik sekularisme yang secara formal menjunjung netralitas agama, namun secara substantif memberikan perlakuan istimewa kepada suatu kelompok agama tertentu (Ajithkumar 2025).

CAA tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan imigrasi atau perlindungan minoritas dari negara lain, melainkan sebagai alat hukum yang diberlakukan oleh negara dalam mengelompokkan kewarganegaraan berdasarkan identitas agamanya. Melalui klaim netralitas dan kemanusiaan, negara secara struktural telah mengecualikan Muslim dari akses terhadap perlindungan hukum yang setara dengan agama lainnya. Proses ini menunjukkan bagaimana Islamofobia tidak hanya hadir dalam lingkup masyarakat sosial, tetapi dilembagakan melalui hukum negara yang sengaja dibentuk untuk membedakan antar kelompok masyarakat (Ananda 2024).

Pengesahan CAA kemudian menyebabkan protes besar-besaran di berbagai wilayah India. Protes pertama kali terjadi di wilayah Assam, dimana protes tersebut dilakukan sebagai bentuk kekhawatiran adanya ancaman terhadap bahasa, budaya, serta struktur penduduk asli Assam apabila masuknya imigran dalam jumlah besar ke wilayah mereka (Bhattacharyya 2024). Selain di wilayah Assam, protes juga terjadi di beberapa wilayah lainnya seperti di Meghalaya, Tripura, Delhi dan wilayah lainnya. Penanganan protes ini diwarnai dengan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan, yang mengakibatkan lebih dari 100 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami luka-luka (Al Jazeera 2024).

Meskipun telah disahkan selama 5 tahun, kebijakan ini masih tetap mendapatkan penolakan oleh masyarakat luas. Pada Maret 2024, Mahkamah Agung India menerima setidaknya 237 petisi yang menentang konstitusionalitas Undang-Undang tersebut (Rajagopal 2024). Pengecualian sistematis terhadap kelompok minoritas seperti Muslim menjadikan CAA sebagai bentuk Islamofobia struktural, dimana diskriminasi dilembagakan melalui hukum negara. Kebijakan ini

memiliki keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari pengimplementasian NRC, karena kelompok non-Muslim yang kehilangan kewarganegaraanya akibat NRC tetap akan mendapatkan perlindungan melalui kebijakan CAA. Sementara itu, kelompok Muslim yang juga berada dalam situasi yang sama tidak akan mendapatkan perlindungan serupa. Kombinasi CAA dan NRC menunjukkan bagaimana negara secara sadar menggunakan instrumen hukum untuk menargetkan, mengecualikan, dan meminggirkan komunitas Muslim dari hak kewarganegaraan penuh di India.

3.1.4 *Anti-Conversion law*

Undang-Undang anti-Konversi telah ada di India sejak masa kolonialisme Inggris pada tahun 1930, ketika beberapa kerajaan Hindu mulai menerapkan aturan untuk membatasi aktivitas misionaris Kristen. Pada mulanya, kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan pemeluk agama Hindu dari pengaruh konversi agama yang dilakukan oleh Misionaris Kristen pada masa kolonial (Yaseen 2021; Shrivastava 2021). Namun, saat ini, Undang-Undang anti-Konversi mengalami transformasi signifikan baik dari segi tujuan maupun target kebijakan. Undang-Undang ini telah diperbaharui dan disahkan di negara-negara bagian yang dikuasai oleh BJP dan menjadi bagian dari strategi politik yang bertujuan untuk mendorong sentimen anti-Muslim melalui kriminalisasi praktik konversi agama secara paksa (Ganguly 2021; Nielsen dan Selvaraj 2025).

Adapun yang melandasi kebijakan ini yaitu adanya anggapan bahwa kelompok mayoritas Hindu perlahan merasa terancam dengan meningkatnya angka konversi agama di India. Sentimen ini kemudian dimobilisasi oleh kelompok nasional Hindu sayap kanan yang membingkai konversi agama sebagai ancaman

terhadap stabilitas sosial dan identitas nasional (Nielsen dan Selvaraj 2025). Dalam konteks ini, Undang-Undang anti-Konversi dianggap sebagai solusi untuk mencegah konflik sosial yang kemungkinan terjadi. Kebijakan ini pertama kali diadopsi di negara bagian Uttar Pradesh pada tahun 2020 dan hingga tahun 2023 kebijakan ini telah diadopsi di 12 dari 28 negara bagian India. Secara umum, Undang-Undang ini memiliki 3 karakteristik utama, yaitu pelarangan konversi agama secara paksa, kewajiban pemberitahuan kepada otoritas negara, dan pemberian sanksi pidana bagi yang melanggar (Wilson 2023)**.** Ketentuan-ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan standar Hak Asasi Manusia Internasional seperti dalam pasal pasal 18(1) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah menjamin kebebasan beragama (Wilson 2023)**.**

Kebijakan ini juga tidak dapat dipisahkan dari narasi *Love Jihad,* yang secara aktif dibentuk dan disebarkan oleh kelompok sayap kanan Hindu. Narasi ini dibangun diatas teori konspirasi yang menuduh pria Muslim menggunakan cara licik dengan merayu dan menculik perempuan Hindu untuk dinikahi dan memaksa mereka berpindah agama (Nielsen dan Selvaraj 2025). Beberapa politisi BJP bahkan menyatakan bahwa praktik LJ ini merupakan strategi demografis Muslim untuk meningkatkan populasi Muslim di India (Ganguly 2021)**.** Narasi tersebut kemudian digunakan negara untuk membingkai kebijakan anti-konversi sebagai langkah protektif, sekaligus menciptakan ketakutan di kalangan mayoritas Hindu terhadap ancaman demografi Muslim.

Meskipun istilah *Love Jihad* tidak pernah disahkan ataupun diakui oleh pemerintah pusat, istilah ini banyak digunakan dalam narasi politik yang telah

menuduh pria Muslim melakukan konversi paksa terhadap wanita Hindu. Salah satu negara bagian yang sangat gencar mempromosikan kebijakan ini yaitu Madhya Pradesh. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Menteri Utama Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, ia mengatakan bahwasanya "*There will be no jihad in the name of love"* dan bahkan melakukan pengancaman kepada siapapun yang melakukan atau pun berencana untuk melakukan konversi dibawah narasi LJ (Dwary 2021).

Di Madhya Pradesh sendiri larangan konversi ini telah diatur dalam *The Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021.* Berdasarkan kebijakan tersebut siapapun yang akan melakukan konversi wajib memberikan pemberitahuan kepada *District Magistrate* paling lambat dua bulan sebelum terjadinya konversi dan siapapun yang ketahuan melanggar, akan dipidana kurungan penjara paling sedikit satu tahun hingga lima tahun dengan denda tidak kurang dari dua puluh lima ribu rupees. Namun, pengimplementasian kebijakan ini dianggap telah membuka ruang luas bagi pengawasan negara terhadap kehidupan pribadi warga negara, sekaligus mendorong praktik pengawasan sosial serta tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikal (Nielsen dan Selvaraj 2025).

Meskipun Undang-Undang anti-Konversi ini terkesan netral yang berlaku untuk semua agama, namun bukti larangan menunjukkan bahwa kebijakan ini secara tidak proporsional menargetkan pria Muslim, baik melalui pelaporan selektif maupun kriminalisasi sepihak (Human Rights Watch 2021). Pada tahun 2020 hingga 2025 di negara bagian Madhya Pradesh, terdapat setidaknya 285 orang yang ditangkap berdasarkan kebijakan ini, dimana semuanya merupakan pria Muslim dengan tuduhan LJ (Sirothia 2025).

Selain di Madhya Pradesh, kebijak anti-Konversi dengan narasi LJ juga telah ditetapkan di Assam. Pada Agustus 2024, Himanta Biswa Sarma yang merupakan Menteri Utama Assam secara terang-terangan mengumumkan akan memberlakukan kebijakan hukuman penjara seumur hidup kepada pelaku LJ (Kashyap 2024). Kebijakan tersebut akan menargetkan pria Muslim dan orang tua tertuduh. Hal tersebut dilakukan oleh Sarma, karena menurutnya populasi Muslim di Assam semakin meningkat dimana hal tersebut dapat mengancam Hindu yang merupakan identitas asli Assam (Alam 2025; Kashyap 2024).

Mereka yang ketahuan menjalin hubungan dengan wanita Hindu mendapatkan berbagai tindakan kekerasan hingga menyebabkan kematian, teror ataupun ancaman, bahkan penjarahan yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikal serta aparat keamanan (Petersen dan Khan 2022). Adanya tindakan tersebut merupakan dampak dari adanya pidato kebencian dari para politikus yang menggambarkan Muslim sebagai predator yang menyebabkan ketakutan di lingkungan masyarakat terkait adanya hubungan antara pria Muslim dan wanita Hindu. Sehingga segala bentuk kekerasan yang dilakukan merupakan bentuk upaya perlindungan yang dilakukan kelompok Hindu terhadap wanita Hindu (Ghadage 2024).

Kebijakan ini menunjukkan bagaimana pemerintahan India khususnya negara bagian Madhya Pradesh menggunakan Hukum untuk mendiskriminasi kelompok tertentu serta membatasi kebebasan mereka dalam berekspresi terlepas dari agama mereka. Meskipun kebijakan ini berlaku terhadap semua agama, namun, dalam praktiknya kebijakan ini berfokus kepada narasi LJ yang dapat dilihat dari narasi yang diberikan oleh pemerintah negara bagian. Undang-Undang anti-

Konversi ini merepresentasikan bentuk legalitas kecurigaan terhadap Muslim yang dibungkus dalam narasi keamanan, moralitas, dan perlindungan perempuan, sehingga memperkuat Islamofobia yang bersifat sistemik di India (abhade 2023).

3.2 Retorika Pemerintah yang Mempolitisasi Muslim sebagai Ancaman

Dalam kerangka Islamofobia struktural, retorika menjadi indikator penting karena melalui bahasa dan simbol politik, negara mampu membentuk opini publik terhadap Muslim dengan menggambarkan mereka sebagai kelompok yang dicurigai dan berbahaya. Dalam bukunya, Beydoun memberikan gambaran bagaimana sebuah pernyataan pejabat publik seperti "*i think Islam hates us*" tidak hanya merefleksikan pendapat pribadi, tetapi juga mampu memicu peningkatan kecurigaan publik terhadap Muslim yang mengakibatkan meningkatnya ancaman, intimidasi, serta kekerasan terhadap kelompok Muslim (Beydoun 2018).

Hal ini terlihat secara jelas selama masa pemerintahan Narendra Modi, dimana ia beserta beberapa aktor politik lainnya seringkali menggunakan retorika yang terkesan anti-Muslim. Jika pada periode pertama pemerintahan Modi dan BJP dikritik menggunakan *dog-whistle politics,* yaitu menggunakan *coded language* untuk meningkatkan sentimen anti-Muslim. Selama periode pertama terdapat beberapa pidato yang menggunakan istilah Mughal, Shehzada, Pink Revolution, dan Musalamaan. Meskipun tidak menyebutkan secara langsung, namun, istilah ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menimbulkan permusuhan antar kelompok agama dengan mengaitkan pada pemerintahan Aurangzeb (Naqvi 2024).

Pada periode kedua, retorika tersebut mengalami pergeseran menjadi lebih terbuka dan agresif seperti penggunaan kata penyusup atau rayap yang secara

langsung ditujukan kepada Muslim Bengali. Muslim Bengali sendiri merupakan imigran Bangladesh yang masuk ke Assam secara bergelombang selama masa hingga pasca kolonialisme Inggris dan telah tinggal di Assam selama beberapa generasi. Oleh karena itu, pemerintah India telah secara terang-terangan menganggap Muslim khususnya Muslim Bengali sebagai ancaman negara. Adanya retorika tersebut menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan bagi kelompok minoritas, terutama Muslim karena retorika tersebut dianggap dapat menyebabkan meningkatnya kekerasan komunal (Ayyub 2019). Adanya transisi dari *dog-whistle* ke retorika yang lebih terang-terangan ini menunjukkan bagaimana Islamofobia yang semula bersifat pribadi kemudian berubah menjadi Islamofobia struktural yang didukung oleh negara, sehingga mampu memperkuat diskriminasi dalam praktik bernegara.

Promosi ideologi Hindutva semakin menguat melalui retorika aktor politik, terutama menjelang dan selama masa kampanye pemilu. Sebagai contoh, pada pemilu 2019, Amit Shah yang merupakan tokoh BJP, menyebut Muslim sebagai penyusup dan berjanji akan melakukan pengusiran terhadap seluruh penyusup yang ada di India. Dalam pernyataanya, imigran Muslim bahkan diibaratkan sebagai rayap yang dianggap dapat mengambil hak masyarakat asli India secara perlahan. Retorika dehumanisasi ini kemudian diikuti dengan usulan penerapan NRC sebagai mekanisme untuk membersihkan negara dari penyusup, sebagaimana yang telah dilakukan di Assam (Griffiths dan Suri 2019). Retorika ini memainkan peran penting dalam membingkai Muslim bukan sebagai warga negara, melainkan sebagai ancaman keamanan yang harus dikendalikan.

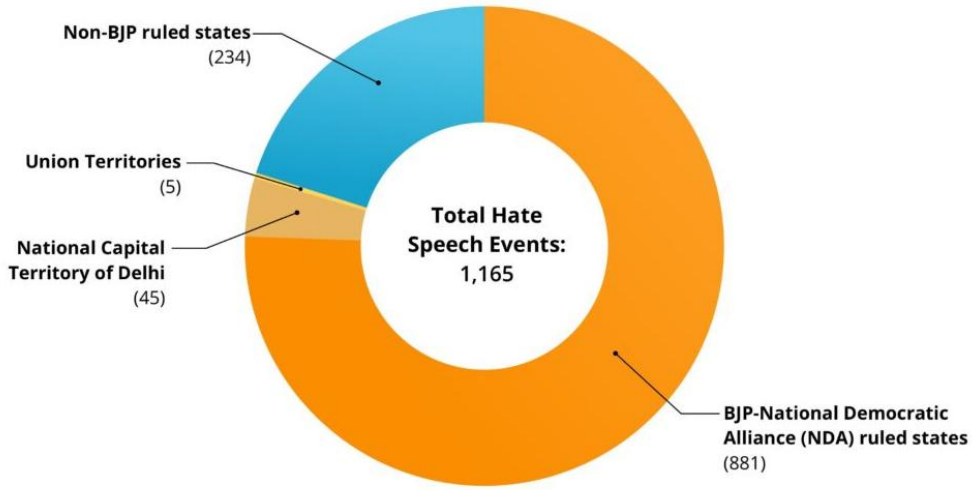
Dampak dari adanya normalisasi retorika anti-Muslim ini tercermin dalam

meningkatnya kasus ujaran kebencian di India. Pada tahun 2023, terdapat setidaknya 668 kasus ujaran kebencian yang tercatat, dengan 255 kasus terjadi pada awal tahun yang kemudian meningkat sebesar 62% menjadi 413 kasus pada paruh kedua. Sekitar 75% atau 498 kasus dari total kasus terjadi di negara bagian yang diperintah oleh BJP, dengan jumlah kasus terbanyak terjadi di Maharashtra, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh (Singh 2024). Bentuk ujaran kebencian tersebut mencakup seruan langsung untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok Muslim, penghancuran Masjid, dan penyebaran narasi konspirasi seperti *Love jihad, land jihad, halal jihad,* dan *population jihad* (IHL 2024). Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan ujaran kebencian terhadap kelompok Muslim tidak hanya terjadi secara acak, melainkan isu yang terpusat di wilayah yang didominasi kekuatan politik tertentu, sehingga mencerminkan dampak langsung dari adanya normalisasi retorika anti-Muslim dalam ruang publik (IHL 2025).

Jika pada tahun 2023 jumlah kasus kebencian yang tercatat sebanyak 668 kasus, maka pada tahun 2024 angka tersebut kembali meningkat secara signifikan seiring dengan pelaksanaan pemilihan Lok Sabha, dengan total 1.165 kasus atau meningkat sebanyak 74,4%. Dari jumlah tersebut, 1.147 atau sekitar 98,5% kasus secara langsung menargetkan kelompok Muslim (Sebastian 2025). Peningkatan ini terjadi selama masa pemilu, dimana tokoh-tokoh seperti Narendra Modi, Amit Shah, dan Yogi Adityanath, serta tokoh yang memiliki keterkaitan dengan organisasi nasionalis Hindu memainkan peran penting dalam menyebarkan ujaran kebencian serta menghasut kekerasan terhadap Muslim. Bentuk hasutan tersebut meliputi seruan kekerasan langsung terhadap Muslim, ajakan mengangkat senjata, boikot ekonomi terhadap bisnis Muslim, dan penghancuran ataupun penyitaan

bangunan keagamaan serta properti pribadi (IHL 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa pidato kebencian semakin meningkat menjelang dan selama pemilihan, sehingga kebencian terhadap Muslim digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik yang secara *de facto* menjadi bagian dari praktik kekuasaan bernegara (Hasan 2023).

Grafik 1. Wilayah Penyebaran Ujaran Kebencian



Sumber: Indian Hate Lab (2025)

Salah satu contoh nyata dampak dari adanya retorika pemerintahan yaitu pada saat upacara peresmian Kuil Ram yang sebelumnya merupakan bekas bangunan Masjid Babri. Dalam pidatonya, Modi mengatakan bahwasanya roda waktu telah berputar dan bangsa India telah bangkit dari perbudakan, namun, pidato tersebut bukan hanya sebatas peresmian semata melainkan bagaimana Modi menggambarkan kelompok Muslim sebagai pelaku perbudakan. Peresmian Kuil tersebut juga dianggap sebagai hari kemenangan dari kekerasan dan perbudakan yang dilakukan kelompok Muslim di masa lalu. Akibat dari pidato Modi tersebut,

terdapat beberapa kasus penyerangan terhadap Muslim di Uttar Pradesh seperti terjadi serangan terhadap pria Muslim setelah peresmian Kuil di Ayodhya, penggeledahan serta penghancuran rumah-rumah Muslim yang diduga menyimpan daging sapi dan penyerangan yang mengakibatkan kematian di Aligarh yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikal (Sharma 2024).

Peningkatan isu Islamofobia di India sepanjang periode 2023-2024 memperlihatkan pola yang konsisten, dimana aktor politik secara terus menerus menggunakan retorika Islamofobia yang tidak hanya mencerminkan prasangka sosial, tetapi berfungsi sebagai mekanisme negara yang dapat mengubah bias anti-Muslim menjadi kebijakan dan praktik publik. Retorika ini tidak hanya melegitimasi tindakan diskriminatif negara terhadap komunitas Muslim, tetapi juga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menormalisasikan diskriminasi terhadap komunitas Muslim. Selain ujaran kebencian dari aktor politik, seorang pendeta Hindu Yati Narsinghanand juga kerap kali menyampaikan ujaran kebencian secara terang-terangan terhadap kelompok Muslim dengan menghasut umat Hindu untuk menyerang dan membunuh Muslim (Genocide Watch 2024). Narsinghanand sendiri dikenal sebagai pendeta Hindu yang kontroversial dimana ia seringkali menyebarkan narasi anti-Muslim dan pernah dikecam karena pernyataannya yang telah menghina Nabi Muhammad pada tahun 2024. Pada tahun 2022 sebelum Narsinghanand diangkat sebagai kepala sekte Hindu, ia telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak Muslim yang berusia 14 tahun dan menyebutnya sebagai pembunuh terlatih (Khare 2022)

Banyaknya retorika ataupun ujaran kebencian terhadap Muslim yang dilakukan oleh para aktor politik dapat dilihat bagaimana Islamofobia di India telah

dilembagakan melalui praktik komunikasi politik negara dan menjadi bagian dari struktur serta mekanisme kekuasaan. Menurut Beydoun, retorika yang memberikan stigma terhadap Muslim berfungsi sebagai mekanisme ideologis yang menormalisasi kebijakan diskriminatif dan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim. Sehingga mampu memperkuat Islamofobia pada level struktural dan tidak hanya sebatas individual (Beydoun 2018).

3.3 Pengawasan Serta Represi Terhadap Kelompok Muslim

Salah satu bentuk paling nyata dari bagaimana negara menginstitusionalkan kecurigaan terhadap kelompok Muslim adalah dengan melakukan praktik pengawasan serta represi yang dilembagakan dalam kebijakan keamanan dan penegakan hukum (Nielsen dan Selvaraj 2025). Praktik ini menunjukkan bagaimana kecurigaan terhadap Muslim diterapkan secara terorganisir oleh negara melalui hukum dan keamanan. Sehingga adanya pengawasan dan represi terhadap Muslim tidak dipandang sebagai pelanggaran hak, tetapi dibingkai sebagai langkah yang sah untuk melindungi keamanan nasional (Elsheikh dan Sisemore 2024).

Selama periode kedua pemerintahan Narendra Modi, terdapat beberapa kasus pengawasan serta tindakan represi terhadap Muslim yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparatur negara. Salah satu bentuk represi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan *Unlawful Activities Prevention Act* (UAPA), yaitu Undang-Undang anti-terorisme yang memberikan kewenangan luas kepada aparat negara untuk melakukan penahanan praperadilan kepada individu yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme (OHCHR 2024). Meskipun secara resmi UAPA dirancang sebagai alat perlindungan keamanan nasional, namun, kebijakan ini

mendapatkan kritik dari berbagai organisasi internasional yang menilai bahwa penerapan UAPA berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kritik tersebut muncul karena penggunaan definisi terorisme yang dinilai terlalu luas dan ambigu, yang memungkinkan terjadinya penahanan praperadilan dalam jangka panjang tanpa jaminan proses hukum yang adil (OHCHR 2024).

Dalam prakteknya, UAPA kerap digunakan secara selektif terhadap para aktivis, mahasiswa, serta tokoh Muslim yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Seorang pengacara sekaligus aktivis HAM, Vrinda Grover mengatakan bahwasanya UAPA merupakan salah satu senjata politik yang digunakan untuk menyudutkan Muslim serta membungkam para aktivis yang tidak sejalan dengan tujuan negara (Kuchay 2019). Meskipun tidak ada data resmi yang dikeluarkan mengenai identitas agama yang ditangkap dibawah UAPA, namun, sebagian besar dari mereka yang identitasnya diketahui merupakan Muslim, akademisi, serta aktivis hak minoritas seperti Umar Khalid, Stan Swamy dan sebagainya yang ditangkap dibawah UAPA tanpa adanya bukti yang jelas (Genocide Watch 2024). Dimana hal ini sangat berbanding terbalik apabila aktor politik ataupun pemuka agama yang terafiliasi dengan ideologi Hindutva melakukan dan menyebarkan ujaran kebencian meskipun ada bukti yang menunjukkan tindakan mereka (Genocide Watch 2024).

Hal ini dapat dilihat dalam penanganan kerusuhan Delhi tahun 2020, yang bermula sebagai protes masyarakat terhadap CAA. Selama peristiwa tersebut, sejumlah aktivis dan warga Muslim yang tidak terlibat langsung dalam kerusuhan dilaporkan menjadi korban penangkapan dibawah UAPA, meskipun tanpa adanya bukti yang memadai (OHCHR 2024; Zaffar dan Denmark 2023). Seperti yang

terjadi kepada 2 aktivis Umar Khalid dan Sharjeel Imam dimana pada saat kerusuhan mereka tidak terlibat dalam kerusuhan namun mereka tetap ditangkap dan dipenjara tanpa adanya peradilan selama 5 tahun dengan tuduhan sebagai provokatif dan telah melakukan penghasutan kekerasan komunal meskipun tuduhan tersebut tidak terbukti hingga saat ini (Saaliq 2026). Selain melakukan penangkapan terhadap kelompok Muslim, pemerintah India juga melakukan pengawasan hingga penghancuran tempat ibadah seperti yang terjadi di beberapa wilayah negara bagian Delhi pada tahun 2024, dimana mereka menghancurkan beberapa Masjid seperti Masjid Faiz-e-Elahi dan selang beberapa hari kemudian mereka kembali menghancurkan Masjid bersejarah Jannatul Firdaus tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dengan alasan Masjid tersebut merupakan bangunan ilegal (Human Rights Watch 2024).

Pola represi terhadap kelompok Muslim juga tercermin dalam jumlah populasi tahanan di India. Pada tahun 2020, sekitar 19,1% dari total populasi tahanan merupakan Muslim, baik warga negara India maupun pendatang (Hasan 2022). Angka ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan, mengingat Muslim merupakan kelompok minoritas dalam struktur demografi India. Ketimpangan tersebut menunjukkan bagaimana penegak hukum yang secara tidak proporsional menempatkan Muslim sebagai subjek kecurigaan kriminal.

Tabel 1. Persentase Tahanan Muslim Tahun 2020

STATES WITH HIGHEST PERCENTAGE OF MUSLIMS IN JAIL					
CONVICTS		UNDERTRIALS		DETENUS	
Assam	47%	Assam	52.30%	Haryana	100%
West Bengal	33%	West Bengal	43.50%	Jammu and Kashmir	96.40%
Kerala	32%	Uttarakhand	30.60%	Telangana	42.60%
Telangana	23.50%	Kerala	27.50%	Kerala	41.30%
Delhi	21%	Uttar Pradesh	28.30%	Karnataka	38%
		Telangana	26%	Gujarat	35.70%
		Tripura	21.80%		

Sumber: Article 14 (2023)

Sebagian besar penahanan tersebut dilakukan atas dakwaan tindak pidana berat seperti pembunuhan, penyerangan, percobaan bunuh diri, dan sebagainya (Hasan 2022). Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa aparat keamanan di India kerap memposisikan Muslim sebagai kelompok dengan tingkat kecurigaan kriminal yang lebih tinggi, sehingga proses penangkapan dalam banyak kasus dilakukan berdasarkan dugaan awal dengan bukti yang terbatas (Hasan 2022; Kuchay 2019). Kondisi ini menunjukkan bagaimana penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme keadilan tetapi sekaligus sebagai alat represi yang berdampak secara tidak adil terhadap kelompok minoritas Muslim.

Selain represi dengan menggunakan sarana hukum, kelompok Muslim di India juga menjadi target pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan *Facial Recognition Technology* (FRT) dan sistem *CCTV* yang berada dibawah pengawasan kepolisian setempat. Teknologi ini mulai digunakan secara intensif setelah terjadinya kerusuhan Delhi pada tahun 2020, khususnya untuk mengidentifikasi individu yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan. Pada tahun 2021, kepolisian dilaporkan telah mengidentifikasi sekitar 1.800 identitas melalui FRT, dengan 137 diantaranya diproses secara hukum berdasarkan rekaman *CCTV*

yang ada (Bhattacharya 2021).

Menurut seorang peneliti hukum dan teknologi, Jai Vipra, selama ini terdapat ketimpangan dalam penegakan hukum dimana kelompok minoritas yang sering menjadi korban dan hal ini akan semakin memburuk apabila teknologi digunakan sebagai sistem dalam upaya penegakan hukum (Bhattacharya 2021). Penggunaan teknologi pengawasan ini menuai kritik luas karena minimnya regulasi yang mengatur transparansi, serta perlindungan privasi masyarakat. Selain itu, adanya potensi bias dan ketidakakuratan dalam FRT yang berisiko berdampak diskriminatif terhadap komunitas yang telah terpinggirkan secara struktural, termasuk Muslim. Dalam hal ini, teknologi tidak berfungsi sebagai alat netral, melainkan memperkuat praktik pengawasan yang telah bias secara sosial dan politik (Amnesty International 2023).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Islamofobia di India pada masa pemerintahan PM Narendra Modi pada periode 2019-204 bukan hanya sebatas prasangka sosial, melainkan telah bertransformasi menjadi Islamofobia struktural yang dilembagakan melalui hukum, kebijakan, retorika politik, serta pengawasan dan represi negara terhadap komunitas Muslim. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip konstitusional India yang merupakan negara sekuler. Dimana negara yang seharusnya bersikap adil terhadap seluruh masyarakat, menjadi aktor utama dalam memproduksi dan menormalisasikan diskriminasi berbasis agama.

Adanya kebijakan seperti pencabutan pasal 370 dan 35A di Jammu dan Kashmir, *Citizenship Amendment Act* (CAA)*, National Register of Citizens* (NRC), dan Undang-Undang anti-Konversi merupakan instrumen hukum yang terlihat tampak netral. Namun, dalam prakteknya, kebijakan tersebut dianggap telah merugikan kelompok minoritas, khususnya Muslim. Kebijakan tersebut secara sistematis telah melenyapkan hak-hak Muslim secara perlahan untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak kewarganegaraan, kebebasan beragama, dan bahkan memposisikan mereka sebagai warga kelas dua dalam sistem politik India.

Selain melalui kebijakan formal, retorika para elit politik seperti BJP dan Narendra Modi berperan sebagai aktor utama dalam mempolitisasi kelompok Muslim sebagai kelompok yang dapat mengancam keamanan nasional dan identitas mayoritas Hindu. Retorika tersebut kemudian mampu melegitimasi kekerasan

komunal, ujaran kebencian, dan bahkan tindakan kekerasan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikal terhadap kelompok Muslim. Adanya normalisasi retorika anti-Muslim menyebabkan meningkatnya kasus ujaran kebencian serta kekerasan berbasis agama di wilayah-wilayah yang didominasi oleh kekuatan politik Hindutva. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islamofobia di India bukan lagi sebatas Islamofobia individual melainkan telah tertanam dalam lingkup struktural.

Penelitian ini juga memaparkan bahwa praktik pengawasan dan represi melalui kebijakan keamanan yang secara selektif menargetkan kelompok Muslim seperti penggunaan *Unlawful Activities Prevention Act* (UAPA), kriminalisasi aktivis dan kelompok Muslim, serta adanya pengawasan berbasis teknologi seperti *Facial Recognition Technology* (FRT), membuktikan bagaimana negara menjadikan identitas Muslim sebagai objek kontrol keamanan nasional. Tingginya jumlah tahanan Muslim, penangkapan prapradilan dengan bukti yang lemah, dan pengawasan selektif menguatkan argumen bahwa mekanisme hukum dan keamanan telah dibentuk sedemikian rupa sehingga memperkuat posisi Muslim sebagai kelompok yang selalu dicurigai dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dibahas oleh penulis dalam skripsi ini dimulai dari bab satu hingga bab tiga, penulis akan memberikan rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Rekomendasi yang bisa penulis berikan yaitu menganalisis peran media dalam memperburuk dan menormalisasi Islamofobia di India melalui penyebaran misinformasi dan

propaganda anti-Muslim. Sehingga penelitian berikutnya mampu menjelaskan bagaimana kebijakan negara dan peran media saling berkaitan dalam membentuk opini publik dan memperburuk marginalisasi kelompok Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

abhade, Neha. 2023. “Anti-Conversion Laws in India: Undermining Democracy and Women’s Rights.” Article. Heinrich-Böll-Stiftung, Juni 12. https://kr.boell.org/en/2023/06/12/anti-conversion-laws-india-undermining-democracy-and-womens-rights.

Agrawal, Rijul. 2024. “The fragile balance: Challenges to secularism in India.” *International Journal of Political Science and Governance* 6 (2): 251–55.

Ajithkumar. 2025. “The Implications of Pseudo Secularism and Human Rights in India.” *International Journal for Research Trends and Innovation* 10 (1).

Al Jazeera. 2023. “What’s Article 370? What to know about India top court verdict on Kashmir.” Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/12/11/whats-article-370-what-to-know-about-india-top-court-verdict-on-kashmir.

Al Jazeera. 2024. “Why is India’s Citizenship Amendment Act so controversial?” Al Jazeera, Maret 12. https://www.aljazeera.com/news/2024/3/12/why-is-indias-citizenship-amendment-act-so-controversial.

Alam, Kazim. 2025. “TRT World - How a New Law in India Targets Muslim Parents in the Name of ‘Love Jihad.’” Article. TRT World, November 3. https://www.trtworld.com/article/1c259a277106.

Ali, Muhammad Nasihudin. 2023. “Religious System in the Mughal Empire during the Period of Shah Jahan and Aurangzeb.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din* 25 (1): 61–68. https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.21580/ihya.25.1.11681.

Amarasingam, Amarnath, Sanober Umar, dan Shweta Desai. 2022. “Fight, Die, and If Required Kill”: Hindu Nationalism, Misinformation, and Islamophobia in India.” *Religions* 13 (5): 1–33. https://doi.org/10.3390/rel13050380.

Amnesty International. 2023. “Is Facial Recognition Racist? | Amnesty International Canada.” Maret 21. https://amnesty.ca/features/racial-bias-in-facial-recognition-algorithms/.

Amnesty International. 2024a. “Authorities Must End Repression of Dissent in Jammu and Kashmir.” *Amnesty International*, September 18. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/09/india-authorities-must-end-repression-of-dissent-in-jammu-and-kashmir/.

Amnesty International. 2024b. “India: Citizenship Amendment Act Is a Blow to Indian Constitutional Values and International Standards.” *Amnesty International*, Maret 14. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/india-citizenship-

amendment-act-is-a-blow-to-indian-constitutional-values-and-international-standards/.

Anand, Tamara. 2020. “Why the CAA+NPR+NRC is a toxic cocktail for everyone.” *CJP*, Januari 27. https://cjp.org.in/why-the-caanprnrc-is-a-toxic-cocktail-for-everyone/.

Ananda, D. 2024. “The intersection of Indian citizenship amendment act 2019 and religious persecution.” *Discover Global Society* 2 (76). https://doi.org/10.1007/s44282-024-00108-x.

Asmer, Mirza. 2024. “The Decline of Muslim Legislative Representation and Its Consequences.” The India Forum, September 4. https://www.theindiaforum.in/politics/decline-muslim-legislative-representation-and-its-consequences.

Awais, Nida. 2025. “Article: Kashmir After August 5th: Unveiling the Reality Behind the Revocation - Kashmir Media Service.” KMS News, Juli 22. https://kmsnews.org/kms/2025/07/22/article-kashmir-after-august-5th-unveiling-the-reality-behind-the-revocation.html?utm.

Awan, Imran, dan Irene Zempi. 2020. *A Working Definition of Islamophobia*. Briefing Paper No. 46th. Ohchr.org. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Religion/Islamophobia-AntiMuslim/Civil%20Society%20or%20Individuals/ProfAwan-2.pdf.

Awasthi, Preeti. 2023. “Special Status Of Jammu And Kashmir Under Article 370 And Its Abrogation: Before And After.” *Alochana Journal* 12 (12).

Ayyub, Rana. 2019. “Religious Hate Crimes in India Surge in Modi’s Second Term.” News. Time, Juni 28. https://time.com/5617161/india-religious-hate-crimes-modi/.

Bajoria, Jayshree. 2020. “‘Shoot the Traitors.’” Human Rights Watch, April 9. https://www.hrw.org/report/2020/04/10/shoot-traitors/discrimination-against-muslims-under-indias-new-citizenship-policy.

Banik, Sajib Kumar. 2022. “The Development Of Hindu Nationalism (Hindutva) In India In The Twenteith Century: A Historical Perspective.” *Philosophy and Progress* 69 (1–2): 211–41. https://doi.org/10.3329/pp.v69i1-2.60190.

Beydoun, Khaled A. 2018. *American Islamophobia: Understanding the Roots and Rise of Fear*. 1st Edition. University of California Press.

Bhattacharya, Ananya. 2021. “Delhi Police’s Facial Recognition Tech Could Make Muslims Likelier Targets.” Scroll.In. https://scroll.in/article/1003602/delhi-polices-facial-recognition-tech-could-make-muslims-likelier-targets.

Bhattacharyya, Rajeev. 2024. “Why Assam Is up in Arms Against Controversial New Indian Citizenship Law.” Maret 25. https://thediplomat.com/2024/03/why-assam-is-up-in-arms-against-controversial-new-indian-citizenship-law/.

Bhoi, Tirtharaj. 2024. “The Abrogation of Article 370 and 35-A in Jammu and Kashmir: A Historical Analysis.” *International Journal of Applied Social Science* 11 (5 & 6): 246–50. https://doi.org/10.36537/IJASS/11.5&6/246-250.

Bridge Initiative. 2022. “2021 Islamophobia in Review: India.” *Bridge Initiative*, Januari 5. https://bridge.georgetown.edu/research/2021-islamophobia-in-review-india/.

Britannica. 2025. “Babri Masjid.” Britannica, September 26. https://www.britannica.com/place/Babri-Masjid.

Chakraborty, Arunaloke. 2024. “The Demolition of Babri Masjid and The Post-Modernist Challenge to History: A Lacanian Answer.” *Journal of Literature and Lingustics Studies* 2 (1): 54–58. https://doi.org/10.61424/jlls.v2i1.118.

Chandrachud, Abhinav. 2020. “Secularism and the Citizenship Amendment Ac.” *Indian Law Review* 4 (2): 138–62. https://doi.org/10.1080/24730580.2020.1757927.

Choudhury, Sumedha. 2023. “India’s Citizenship Amendment Act (2019): ‘Modi’s Magic’ and the Otherisation of Indian Muslims.” Analysis. *Australian Institute of International Affairs*, Juli 13. https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/indias-citizenship-amendment-act-2019-modis-magic-and-the-otherisation-of-indian-muslims/.

CSAP. 2025. *The Historic Assam Accord 1985: A Powerful Moment for Assam!* GS Paper 5. Januari 18. https://csap.co.in/assam-accord/.

Dangubić, Marija, Kumar Yogeeswaran, Maykel Verkuyten, dan Chris G. Sibley. 2023. “The Rejection and Acceptance of Muslim Minority Practices: A Person-Centered Approach.” *Group Processes & Intergroup Relations* 26 (2): 380–405. https://doi.org/10.1177/13684302211067967.

Daniyal, Shoaib. 2020. “Did Amit Shah just scrap plans for an NRC? Not really.” Scroll.in, Maret 13. https://scroll.in/article/956007/did-amit-shah-just-scrap-plans-for-an-nrc-not-really.

D’Souza, Joyston. 2023. “What does Section 6A of the Citizenship Act have to do with the NRC exercise in Assam?” *Supreme Court Observer*. https://www.scobserver.in/journal/what-does-section-6a-of-the-citizenship-act-have-to-do-with-the-nrc-exercise-in-assam/.

Dwary, Anurag. 2021. “Love Jihad Law, First Case Under New Law Against ‘Love Jihad’ Filed In Madhya Pradesh.” NDTV, Januari 18. https://www.ndtv.com/india-news/love-jihad-law-madhya-pradesh-police-file-first-case-under-new-law-against-love-jihad-2354402.

Elsheikh, Elsadig, dan Basima Sisemore. 2024. “Legalizing Othering: Institutionalized Islamophobia and the Subversion of U.S. Democracy.” American Bar Association, November 25. https://www.americanbar.org/groups/crsj/resources/human-rights/2024-november/islamophobia-and-subversion-of-us-democracy/.

Fahmy, Conrad Hackett, Marcin Stonawski, Yunping Tong, Stephanie Kramer, Anne Shi and Dalia. 2025. “How the Global Religious Landscape Changed From 2010 to 2020.” *Pew Research Center*, Juni 9. https://www.pewresearch.org/religion/2025/06/09/how-the-global-religious-landscape-changed-from-2010-to-2020/.

Galan, S. 2025. “Countries with the Largest Population 2025.” Statista, Februari 21. https://www.statista.com/statistics/262879/countries-with-the-largest-population/.

Ganguly, Sumit. 2021. “The problem with India’s ‘love jihad’ laws.” The Conversation, Januari 27. https://doi.org/10.64628/AAI.97udrffcj.

Genocide Watch. 2023. “The 2002 Gujarat Genocidal Massacres.” Genocidewatch. https://www.genocidewatch.com/single-post/the-2002-gujarat-genocidal-massacres.

Genocide Watch. 2024. “The Ten Stages of Genocide in India - Part Three.” Genocidewatch, November 18. https://www.genocidewatch.com/single-post/the-ten-stages-of-genocide-in-india-part-three.

Ghadage, Tushar. 2024. “2024: Love Jihad as a Socio-Political Tool: Caste, Endogamy, and Hindutva’s Dominance over Gender and Social Boundaries in India.” *CJP*, November 22. https://cjp.org.in/2024-love-jihad-as-a-socio-political-tool-caste-endogamy-and-hindutvas-dominance-over-gender-and-social-boundaries-in-india/.

Griffiths, James, dan Manveena Suri. 2019. “Outrage over BJP Promise to ‘Remove Every Single Infiltrator’ from India.” CNN, April 12. https://www.cnn.com/2019/04/12/india/india-bjp-tweet-intl.

Hasan, Waquar. 2022. “Why The Percentage Of Muslim Prisoners In India’s Jails Is Disproportionate to Their Population In India.” Article 14, Maret 15. https://article-14.com/post/why-the-percentage-of-muslim-prisoners-in-india-s-jails-is-disproportionate-to-their-population-in-india--6230001268058.

Hasan, Waquar. 2023. “Anti-Muslim hate speech in India spikes around elections, report says.” *Al Jazeera*, September 26. https://www.aljazeera.com/news/2023/9/26/anti-muslim-hate-speech-in-india-spikes-around-elections-report-says.

Hassan, Aakash, dan Hannah Ellis-Petersen. 2023. “‘Bulldozer Politics’: Modi’s Demolition Drive Fuels Muslims’ Fears in Kashmir.” World News. *The Guardian*, Maret 19. https://www.theguardian.com/world/2023/mar/19/bulldozer-politics-modi-demolition-drive-fuels-muslims-fears-in-kashmir.

Hawaleshka, Danylo. 2023. “History Illustrated: The Rise and Rise of Islamophobia in India.” Al Jazeera, April 18. https://www.aljazeera.com/gallery/2023/4/18/history-illustrated-the-rise-of-islamophobia-in-india.

Hindustan Times. 2024. “‘CAA against Right to Equality’, Says Asaduddin Owaisi.” Hindustan Times, Maret 12. https://www.hindustantimes.com/india-news/caa-against-right-to-equality-says-asaduddin-owaisi-101710240830272.html.

Hindutva Watch. 2024. “Home Minister Amit Shah Delivers Anti-Muslim Hate Speech in Sahibganj.” News. *Hindutva Watch*, September 20. https://www.hindutvawatch.org/home-minister-amit-shah-delivers-anti-muslim-hate-speech-in-sahibganj/.

Human Rights Watch. 2021. “India: Government Policies, Actions Target Minorities.” Human Rights Watch, Februari 19. https://www.hrw.org/news/2021/2/19/india-government-policies-actions-target-minorities.

Human Rights Watch. 2024. *India: Hate Speech Fueled Modi’s Election Campaign*. https://www.hrw.org/news/2024/08/14/india-hate-speech-fueled-modis-election-campaign.

IHL. 2024. “Report 2023: Hate Speech Events in India.” *India Hate Lab (IHL)*, Februari 25. https://indiahatelab.com/2024/02/25/hate-speech-events-in-india-2023-annual-report/.

IHL. 2025. “Report 2024: Hate Speech Events in India.” *India Hate Lab (IHL)*, Februari 10. https://indiahatelab.com/2025/02/10/hate-speech-events-in-india-2024/.

Jathol, Iqra, Muhammad Munib Khalid, dan Imran Ashraf. 2019. “Hindutva: Impacts on Indian Muslim Community.” *Pakistan Languages and Humanities Review* 3 (1): 01–10. https://doi.org/doi.org/10.47205/plhr.2019(3-I)2.1.

Jayal, Niraja Gopal. 2022. “Reinventing the Republic: Faith and Citizenship in India.” *SAGE Journals* 10 (1): 14–30. https://doi.org/10.1177/23210230221082799.

Kashyap, Saraswat. 2024. “New Law in Assam Soon for Life Imprisonment in ‘love Jihad’ Cases: Himanta Sarma.” News. India Today. https://www.indiatoday.in/india/story/assam-love-jihad-chief-minister-himanta-biswa-sarma-life-imprisonment-law-2576792-2024-08-04.

Khan, Aafreen. 2023. “India’s Discrimination against Muslims Expands to Housing.” FairPlanet, Januari 12. https://www.fairplanet.org/story/indias-discrimination-against-muslims-expands-to-housing/.

Khan, Muhammad Ahmad, dan Shafaq Zernab. 2024. “Religiophobia or Islamophobia? Deciphering India’s Inconsistency - Religion and Global Society.” *Religion and Global Society - Understanding Religion and Its Relevance in World Affairs*, Juni 5. https://blogs.lse.ac.uk/religionglobalsociety/2024/06/religiophobia-or-islamophobia-deciphering-indias-inconsistency/.

Khare, Vineet. 2022. “Yati Narsinghanand Saraswati: Who Is the Arrested Hindu Priest?” News. BBC News, Januari 20. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59952851.

Khrisnan, Murali. 2024. “What’s next after India Outlaws ‘Bulldozer Justice?’” News. Dw.Com, November 18. https://www.dw.com/en/whats-next-after-india-outlaws-bulldozer-justice/a-70809419.

Khurana, Khurana And. 2024. “Decoding the Abrogation of Article 370- Impact & Debates.” Khurana And Khurana, April 24. https://www.khuranaandkhurana.com/2024/04/24/decoding-the-abrogation-of-article-370-impact-debates/.

Korobi, Sadia Aktar. 2024. “The Impossible Case of India-Wide NRC: Potential Fallout of India-Bangladesh Relations?” *Modern Diplomacy*, Maret 29. https://moderndiplomacy.eu/2024/03/29/the-impossible-case-of-india-wide-nrc-potential-fallout-of-india-bangladesh-relations/.

Kramer, Stephanie. 2021. “Population Growth and Religious Composition.” *Pew Research Center*, September 21. https://www.pewresearch.org/religion/2021/09/21/population-growth-and-religious-composition/.

Kuchay, Bilal. 2019. “Half of India Police Feel Muslims More Likely to Commit Crimes.” Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2019/8/28/half-of-india-police-feel-muslims-more-likely-to-commit-crimes.

Lubis, Dede Efrianti, Ahmad Muhajir, dan Zaini Dahlan. 2021. “Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal di India.” *Islamic Education* 1 (2): 41–46.

Maizland, Lindsay. 2024. “A history of the marginalization of India’s Muslim population.” PBS News, April 28. https://www.cfr.org/backgrounder/india-muslims-marginalized-population-bjp-modi.

Menon, Uma. 2023. “India’s National Register of Citizens Threatens Mass Statelessness.” Journal of Public and International Affairs, Juni 2. https://jpia.princeton.edu/news/indias-national-register-citizens-threatens-mass-statelessness.

Naqvi, Farah. 2024. “From Dog Whistles to Public Abuse of Muslims: BJP’s Speeches Don’t Need Plausible Deniability Anymore.” The Wire. https://thewire.in/politics/from-dog-whistles-to-public-abuse-of-muslims-bjps-speeches-dont-need-plausible-deniability-anymore.

Narain, Vrinda. 2024. “The End of a Dream?” *Verfassungsblog*, advance online publication, April 23. https://doi.org/10.59704/9553ad36750d5dfd.

Nielsen, Kenneth Bo, dan M. Sudhir Selvaraj. 2025. “India’s new anti-conversion laws - Department of Social Anthropology.” University of Oslo, Maret 12. https://www.sv.uio.no/sai/english/research/projects/csad/blog/india%E2%80%99s-new-anti-conversion-laws.html.

Nisa, Mehr Un. 2025. “HUMAN RIGHTS REPORT.” Https://Kiir.Org.Pk//Reports/Human-Rights-Report-5232. https://kiir.org.pk//Reports/human-rights-report-5232.

OHCHR. 2024. *The Indian (ab)use of counter-terrorism law Unlawful Activities Prevention Act in Kashmir*. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/terrorism/sr/cfis/cfi-gs-impact-ct-measures/subm-global-study-impact-cso-justice-all.pdf.

Pathi, Krutika, dan Sheikh Saaliq. 2024. “Once a Fringe Indian Ideology, Hindu Nationalism Is Now Mainstream, Thanks to Modi’s Decade in Power.” AP News, April 18. https://apnews.com/article/india-election-narendra-modi-hindu-nationalism-rss-79c30c8ae750a9c037d86b9e2c1b640c.

Petersen, Hannah Ellis, dan Ahmer Khan. 2022. “‘They Cut Him into Pieces’: India’s ‘Love Jihad’ Conspiracy Theory Turns Lethal.” World News. *The Guardian*, Januari 21. https://www.theguardian.com/world/2022/jan/21/they-cut-him-into-pieces-indias-love-jihad-conspiracy-theory-turns-lethal.

Philip, Snehesh Alex. 2019. “What Imran Khan says is 9 lakh soldiers in Kashmir is actually 3.43 lakh only.” *ThePrint*, November 12.

https://theprint.in/defence/what-imran-khan-says-is-9-lakh-soldiers-in-kashmir-is-actually-3-43-lakh-only/319442/.

Rajagopal, Khishnadas. 2024. “CAA Act: SC agrees to hear plea for stay of Citizenship Amendment Act, its rules on March 19 - The Hindu.” News. The Hindu, Maret 15. https://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-agrees-to-hear-plea-for-stay-of-citizenship-amendment-act-its-rules-on-march-19/article67953760.ece.

Saaliq, Sheikh. 2026. “India’s top court denies bail to 2 Muslim activists after 5 years in jail without trial.” AP News, Januari 5. https://apnews.com/article/india-delhi-riots-umar-khalid-sharjeel-imam-51c3925ad9bf6b881857c8330210fa79.

Sahgal, Neha, Jonathan Evans, Ariana Monique Salazar, Kelsey Jo Starr, dan Manolo Corichi. 2021. “Religious Freedom, Discrimination and Communal Relations.” Pew Research Center, Juni 29. https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religious-freedom-discrimination-and-communal-relations/.

Sahoo, Niranjan. 2025. “The Majoritarian Challenge to Minority Rights in India: The Case of Muslims.” East Asia Intitute, Juli 2. https://www.eai.or.kr/eng/press/press_01_view.php?no=11206.

Saikia, Yasmin. 2019. “The National Registry of Citizens: Violating Muslims, Violating Humanity in Assam.” *Global Citizenship Observatory*. https://globalcit.eu/the-national-registry-of-citizens-violating-muslims-violating-humanity-in-assam/.

SCO. 2024. “Validity of Section 6A of the Citizenship Act, 1955 (Assam Accord).” *Supreme Court Observer*. https://www.scobserver.in/cases/assam-public-works-v-union-of-india-assams-national-register-of-citizens-background/.

Sebastian, Meryl. 2025. “India sees huge spike in hate speech in 2024, says report.” *BBC News*, Februari 11.

Selvaraj, M. Sudhir. 2024. “India election: how Narendra Modi’s BJP uses and abuses religious minorities for political purposes.” The Conversation, Mei 8. http://theconversation.com/india-election-how-narendra-modis-bjp-uses-and-abuses-religious-minorities-for-political-purposes-228570.

Sen, Somdeep. 2022. “Analysis: Islamophobia Is the Norm in Modi’s India.” Al Jazeera, Juni 10. https://www.aljazeera.com/features/2022/6/10/analysis-islamophobia-is-the-norm-in-modis-india.

Shrivastava, Aniruddha. 2021. “An Analysis of Anti-Conversion Laws in India.” *International Journal of Integrated Law Review* 2 (1): 93–100.

Siddique, Nazimuddin, dan Sujata Ramachandran. 2024. “The punitive gap: NRC, due process and denationalisation politics in India’s Assam.” *Comparative Migration Studies* 12 (34): 1–18. https://doi.org/10.1186/s40878-024-00393-0.

Siddiqui, Kalim. 2022. “British Imperialism, Religion, and the Politics of ‘Divide and Rule’ in the Indian-Subcontinent.” *The World Financial Review*, Januari 25. https://worldfinancialreview.com/british-imperialism-religion-and-the-politics-of-divide-and-rule-in-the-indian-subcontinent/.

Singh, Kanishka. 2024a. “Anti-Muslim Hate Speech Soars in India, Research Group Says.” India. *Reuters*, Februari 26. https://www.reuters.com/world/india/anti-muslim-hate-speech-soars-india-research-group-says-2024-02-26/.

Singh, Kanishka. 2024b. “US, UN express concern about India’s religion-based citizenship law | Reuters.” Reuters, Maret 14. https://www.reuters.com/world/us-un-express-concern-about-indias-religion-based-citizenship-law-2024-03-12/?utm.

Sirothia, Ankur. 2025. “283 ‘love jihad’ cases lodged in MP since 2020, assembly told.” News. Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/283-love-jihad-cases-lodged-in-mp-since-2020-assembly-told/articleshow/123127042.cms.

Szczepanski, Kallie. 2025. “What Was the Indian Revolt of 1857?” ThoughtCo, April 29. https://www.thoughtco.com/the-indian-revolt-of-1857-195476.

Thakur, Nisar Ahmed. 2024. “5 YEARS AFTER REVOCATION OF ARTICLE 370/35-A.” Kiir.Org. https://kiir.org.pk/reports/5-years-after-revocation-of-article-37035-a-4558.

The Hindu. 2024. “People Will Have No Choice but to Oppose CAA Rules, Says Owaisi.” Telangana. *The Hindu*, Maret 11. https://www.thehindu.com/news/national/telangana/people-will-have-no-choice-but-to-oppose-caa-rules-says-owaisi/article67940326.ece.

The Wire. 2024. “Assam: Government Reveals Religion-Wise Break-Up of NRC Exclusions for the First Time.” News. The Wire, Maret 19. https://thewire.in/communalism/assam-government-reveals-religion-wise-break-up-of-nrc-exclusions-for-the-first-time.

Tippabhatla, Udeerna. 2021. “5 things to know about the 1971 Bengali Hindu genocide.” News. Hindu American Foundation, Maret 19. https://www.hinduamerican.org/blog/5-things-to-know-about-1971-bangladesh-genocide.

Vajiram & Ravi. 2025a. *National Register of Citizens India, Importance, NRC Assam*. Quest Level 3. Februari 18. https://vajiramandravi.com/upsc-exam/national-register-of-citizens/.

Vajiram & Ravi. 2025b. *Secularism in India, Challenges, UPSC Notes*. Quest UPSC Notes. Mei 3. https://vajiramandravi.com/upsc-exam/secularism/.

Veracini, Lorenzo. 2022. "Kashmir: Is It Settler Colonialism?" *Positions Politics*. https://positionspolitics.org/kashmir-is-it-settler-colonialism/.

Verma, Shylaja. 2019. "Omar Abdullah Warns Of 'Dangerous Consequences' After Article 370 Move." Www.Ndtv.Com, NDTV. https://www.ndtv.com/india-news/article-370-jammu-and-kashmir-omar-abdullah-says-aggression-against-people-of-j-k-2080458.

Vora, Advay. 2023. "Article 370 of the Constitution: A Timeline." *Supreme Court Observer*, Juli 31. https://www.scobserver.in/journal/article-370-of-the-constitution-a-timeline/.

Waikar, Prashant. 2018. "Reading Islamophobia in Hindutva: An Analysis of Narendra Modi's Political Discourse." *ISLAMOPHOBIA STUDIES JOURNAL* 4 (2): 161–80.

Wilson, Luke. 2023. "Issue Update: India's State-Level Anti-Conversion Laws." USCIRF, Maret. https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2023%20India%20Apostasy%20Issue%20Update.pdf.

Yaseen, Ahmed. 2021. "History of Religious Freedom And Anti-Conversion Lws In India." *Indian Journal of Law and Legal Research* 2 (2): 1–12.

Yunariono, Bastian. 2023. "Konflik Umat Hindu-Muslim Di India Era Pemerintahan Narendra Modi." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan* 27 (2): 219–37. https://doi.org/10.31315/.

Zaffar, Hanan, dan Pandit Denmark. 2023. "Delhi riots: Muslims in jail since 2020 as terror law 'misused.'" Al Jazeera, Februari 28. https://www.aljazeera.com/news/2023/2/28/india-terror-law-haunts-muslims-jailed-since-2020-for-delhi-riots.

Zalukhu, Derita Murni. 2024. "Dinasti Mughal Dan Kemunduran Islam Di India Tahun 1525-1857 M." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 3 (2): 125–34.

Zargar, Anees. 2021. "Over 41 Lakh Domicile Certificates Distributed in J&K Since Abrogation of Article 370." NewsClick. https://www.newsclick.in/Over-41-Lakh-Domicile-Certificates-Distributed-J%26K-Since-Abrogation-Article-370.

Zargar, Haris, dan Goldie Osuri. 2024. “The Distinct Dispossessions of Indian Settler Colonialism in Kashmir: Land, Narrative and Indigeneity.” *International Institute of Social Studies* 54 (6): 1399–424. https://doi.org/10.1111/dech.12809.

Zishan, Ziafat, Jalal-Ud-Din Kakar, dan Javeria Fatima. 2022. “The Rise Of Hindutva: Implications For Indian Muslim Minorities.” *Pakistan Journal of Social Research* 4 (2): 923–32.